



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Trade Policy & Strategic Issue

# TRADE POST

*e-magazine*



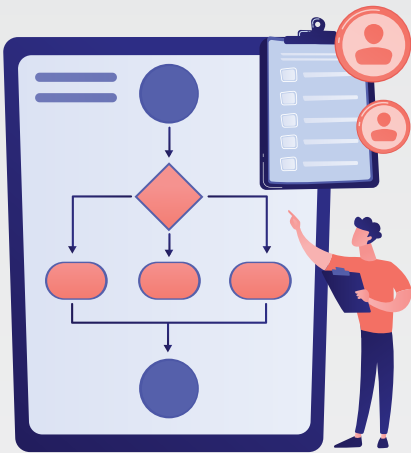
ISSN 2830-7208











# BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

“BKPerdag dibentuk sesuai **Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022** tentang Kementerian Perdagangan dan **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022** tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.”.

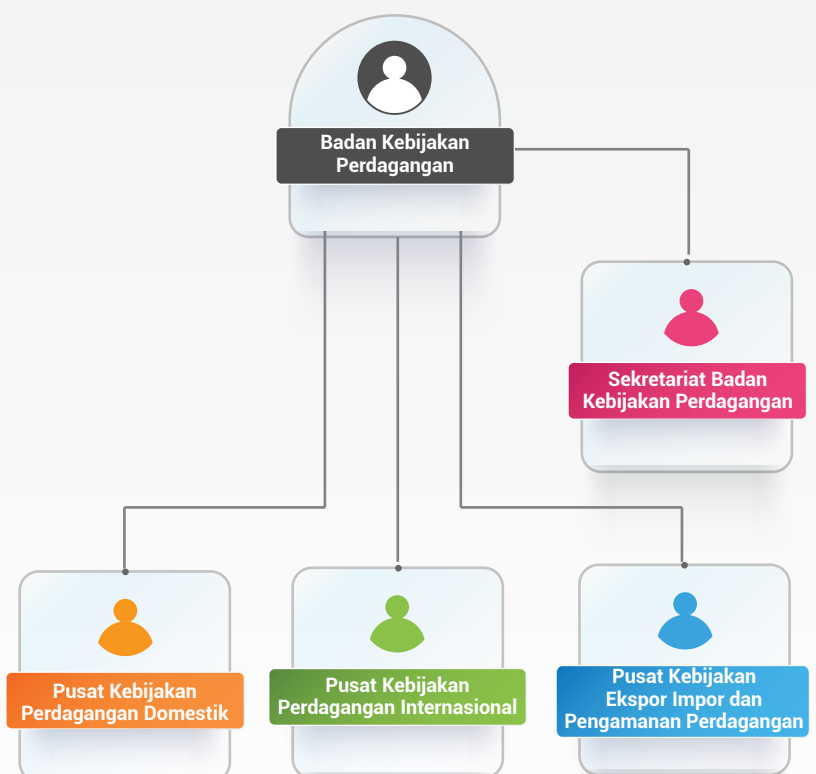
Badan Kebijakan Perdagangan **mempunyai tugas** menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kebijakan Perdagangan **menyelenggarakan fungsi:**

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan;
- Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan;
- Pelaksanaan administrasi badan kebijakan perdagangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Kebijakan Perdagangan **terdiri atas:**

- Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan;
- Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik;
- Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional; dan
- Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan.



## Susunan Redaksi

### KETUA DEWAN REDAKSI

Dr. Ir. Kasan, MM

### ANGGOTA DEWAN REDAKSI

Zamroni Salim, Ph.D

Dr. Wayan R. Susila, APU

Ernawati Munadi, Ph.D

Ir. Sri Nastiti Budianti, M.Si.

### REDAKTUR TAMU

Dr. Ir. Iskandar Panjaitan, M.Sc.

Rr. Dyah Palupi, S.Si, M.Si

### PENANGGUNG JAWAB PENERBITAN

Drs. Hari Widodo, MA.

### REDAKSI PELAKSANA

Dyah Ekowati Sulistyarini, SH, M.Si

Maulida Lestari, SE, ME

Primakrisna Trisnoputri, SIP, MBA

Triana K. Lestari, SE

Andrika Sembiring, SE

Erwin Abdiwijaya, S.Kom

### SEKRETARIAT

Dewi Suparwati, S.Si

Elfan Fadillah, SE

Dwi Yulianto, S.Kom

### ALAMAT REDAKSI

Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan

Kementerian Perdagangan RI

Gedung Utama Lantai 3 dan 4

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5,

Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 23528681

Fax. (021) 23528691

Email: publikasi.bkperdag@kemendag.go.id

## DISCLAIMER

Publikasi ini disusun hanya sebatas sebagai informasi. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi atas tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan pada publikasi ini.

@Hak Cipta Badan Kebijakan Perdagangan

# Catatan dari Meja Redaksi



Tahun 2023 menjadi tahun lanjutan bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil terjaga dikisaran lima persen pada Triwulan I-2023. Sejumlah indikator makroekonomi Indonesia juga berada pada level menguat, seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang stabil di atas 120 poin dan *Purchasing Managers Index* (PMI) yang juga stabil di atas 50 poin.

Kebijakan transformasi ekonomi yang diusung oleh Pemerintah Indonesia dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga pemulihan ekonomi Indonesia. Alih-alih terjebak dengan dampak pandemi berkepanjangan dan status sebagai negara berpenghasilan menengah, Indonesia justru terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara berpenghasilan tinggi dan maju pada 2045.

Hilirisasi industri, utamanya di sektor tambang, menjadi bagian dari transformasi ekonomi Indonesia yang menarik untuk dicermati dalam edisi ini. Di tengah isu perubahan lingkungan, peran strategis Indonesia sebagai produsen nikel dunia yang berpotensi menjadi sumber daya bagi energi terbarukan tentu menjadi rebutan. Komoditas logam akan menjadi input utama dalam upaya dekarbonisasi dan elektrifikasi ekonomi saat dunia

beralih dari bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan seperti listrik, tenaga surya, turbin angin, dan kendaraan listrik.

Secara keseluruhan *Trade Post* edisi pertama tahun 2023 memuat delapan artikel terkait isu dan kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri yang perlu diketahui publik. Jangan lewatkan juga dua sajian data perdagangan beserta ulasannya dalam rubrik Teropong. Melengkapi *milestone* BKPerdag, informasi ringan seputar kegiatan BKPerdag selama enam bulan terakhir juga dapat diikuti publik melalui Kabar BKPerdag.

Sebagai pamungkas, Redaksi juga ingin mengucapkan selamat kepada BKPerdag yang genap berusia satu tahun pada 27 Juni 2023. Semoga BKPerdag dapat terus memberikan rekomendasi kebijakan terbaik untuk mendukung pertumbuhan perdagangan Indonesia sebagaimana makna dari slogan *Policy for Better Trade!*

Selamat Membaca.

**Juni, 2023**



# Upaya Mendorong Ekspor Sarang Burung Walet Melalui Penyederhanaan Tata Niaga Ekspor

Sarang Burung Walet (SBW) merupakan sumber pangan fungsional yang secara ilmiah telah terbukti memiliki manfaat dalam pencegahan penyakit diantaranya melalui penguatan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan respirasi, menurunkan masalah pencernaan dan merangsang pertumbuhan epidermis (Wahyuni, *et al.*, 2021). Berbagai macam produk olahan SBW telah banyak diperdagangkan secara global, baik dalam bentuk makanan hingga produk kecantikan. Hal tersebut mendorong meningkatnya permintaan dunia akan produk SBW.

Indonesia merupakan negara penghasil SBW terbesar yang menyumbang 85% produksi dunia, diikuti oleh Malaysia dengan pangsa 13% (Kong, *et al.*, 2016). Berdasarkan informasi dari Asosiasi Peternak Pedagang Sarang Walet Indonesia (APPSWI) dengan mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi SBW Indonesia diperkirakan mencapai 1.500 Ton per tahun (Bisnis Indonesia, 2022). Sebagai produsen utama, Indonesia juga menjadi eksportir terbesar produk

SBW dunia. Dengan potensi tersebut, SBW menjadi salah satu produk unggulan ekspor nasional yang harus terus didorong peningkatan ekspornya. SBW bahkan sering disebut dengan “emas putih” karena harganya yang mahal.



Impor dunia untuk produk SBW selama 2017–2021 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,20% per tahun, dengan nilai impor mencapai USD 1,03 Miliar pada 2021. Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Hongkong, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat (AS) merupakan importir utama SBW dunia. Secara kumulatif kelima negara tersebut memiliki kontribusi sebesar 83,41% dari total impor dunia, di mana RRT menjadi pasar dunia yang sangat penting. Sebanyak 53,76% impor SBW dunia diimpor oleh RRT, yang kemudian disusul oleh Hongkong dengan pangsa mencapai 12,99%. Di antara kelima negara importir

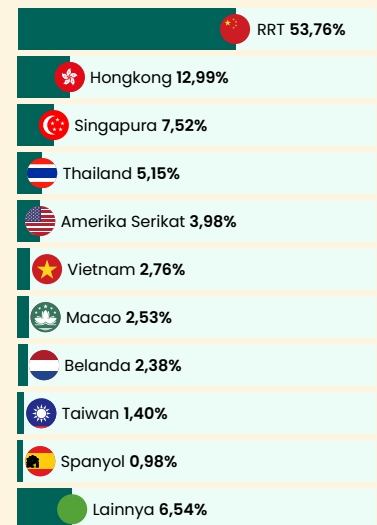
utama tersebut, kinerja impor RRT menunjukkan kenaikan yang paling signifikan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 40,23% (Tabel 1).



**Tabel 1. Importir Utama Produk SBW Dunia**

No	Importir	Nilai (USD Juta)					Tren (%) 17-21
		2017	2018	2019	2020	2021	
	<b>Dunia</b>	<b>672,93</b>	<b>765,43</b>	<b>840,59</b>	<b>948,96</b>	<b>1.027,73</b>	<b>11,20</b>
1	RRT	154,68	237,61	330,49	547,96	552,53	40,23
2	Hong Kong	227,16	166,25	188,06	145,88	133,52	-11,25
3	Singapura	91,41	114,35	84,71	53,94	77,28	-10,30
4	Thailand	60,07	84,34	56,71	41,12	52,98	-9,24
5	Amerika Serikat	25,48	26,42	22,65	24,51	40,92	9,11
6	Vietnam	8,14	8,66	11,87	9,69	28,36	29,79
7	Macao	6,98	6,98	11,03	4,02	26,02	23,11
8	Belanda	14,65	18,82	27,61	26,76	24,42	14,74
9	Taiwan	14,90	14,21	13,51	12,31	14,36	-2,14
10	Spanyol	4,82	5,48	7,05	9,70	10,11	22,01
	<b>Lainnya</b>	<b>64,65</b>	<b>81,94</b>	<b>86,91</b>	<b>73,36</b>	<b>67,23</b>	<b>-0,32</b>

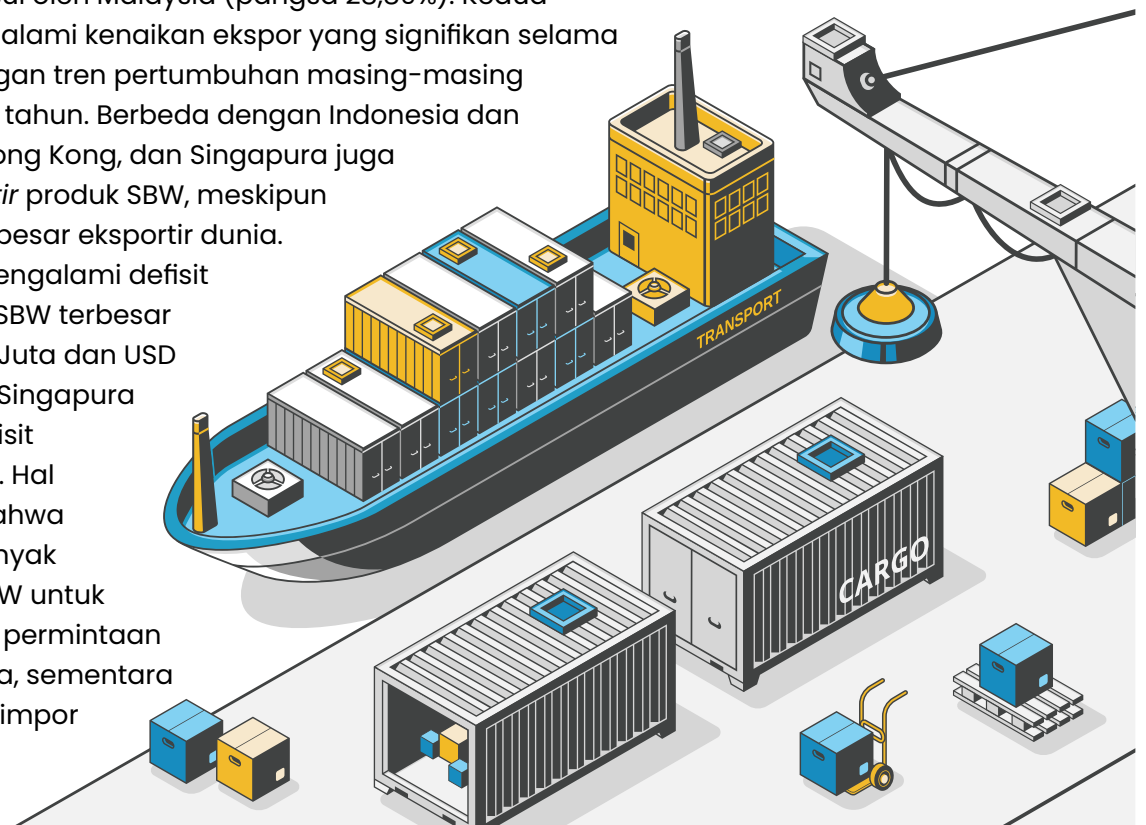
**Pangsa (%) 2021**



Sumber: ITC, Trademap (2023), diolah Puska EIPP

Ket: Data full year 2022 belum tersedia untuk semua negara

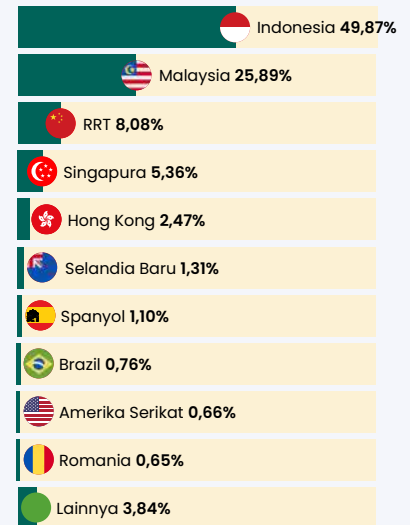
Dari sisi ekspor, Indonesia bersama Malaysia, RRT, Singapura, dan Hong Kong menjadi eksportir utama SBW dunia. Indonesia menduduki peringkat pertama dengan pangsa sebesar 49,87% pada tahun 2021, disusul oleh Malaysia (pangsa 28,89%). Kedua negara tersebut mengalami kenaikan ekspor yang signifikan selama periode 2017–2021 dengan tren pertumbuhan masing-masing 20,24% dan 43,28% per tahun. Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, untuk RRT, Hong Kong, dan Singapura juga merupakan *net importir* produk SBW, meskipun masuk ke dalam lima besar eksportir dunia. RRT dan Hong Kong mengalami defisit perdagangan produk SBW terbesar mencapai USD 468,70 Juta dan USD 107,9 Juta, sedangkan Singapura hanya mengalami defisit sebesar USD 21,70 Juta. Hal ini mengindikasikan bahwa RRT dan Hongkong banyak mengimpor produk SBW untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar dalam negerinya, sementara Singapura melakukan impor untuk sebagian besar diekspor kembali ke luar negeri.



**Tabel 2. Negara Eksportir Utama Produk SBW Dunia**

No	Eksportir	Nilai (USD Juta)					Tren (%) 17-21
		2017	2018	2019	2020	2021	
	<b>Dunia</b>	<b>627,69</b>	<b>713,84</b>	<b>756,60</b>	<b>982,76</b>	<b>1.037,85</b>	<b>14,17</b>
1	Indonesia	280,59	291,35	364,20	540,76	517,54	20,24
2	Malaysia	63,61	105,73	135,57	215,99	268,71	43,28
3	RRT	83,37	95,54	82,10	90,92	83,84	-0,38
4	Singapura	77,58	86,08	57,25	41,18	55,60	-13,09
5	Hong Kong	15,64	18,44	16,48	14,32	25,65	7,64
6	Selandia Baru	2,68	5,94	2,37	7,36	13,64	41,48
7	Spanyol	7,06	6,83	9,02	12,15	11,38	16,53
8	Brazil	4,26	5,20	4,93	7,62	7,94	17,64
9	Amerika Serikat	43,27	40,63	23,78	7,73	6,90	-41,33
10	Romania	0,99	2,33	4,34	4,88	6,76	57,99
	<b>Lainnya</b>	<b>48,64</b>	<b>55,77</b>	<b>56,57</b>	<b>39,86</b>	<b>39,90</b>	<b>-7,06</b>

Pangsa (%) 2021



Sumber: ITC, Trademap (2023), diolah Puska EIPP

Ket: data full year 2022 belum tersedia untuk semua negara

Selama 10 tahun terakhir, ekspor SBW Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Akselerasi ekspor SBW Indonesia terjadi setelah RRT sebagai importir utama dunia kembali membuka akses pasar bagi Indonesia setelah sempat ditutup pada periode 2010–2014. Di tahun 2022, ekspor SBW Indonesia mencapai rekor tertinggi dengan nilai ekspor sebesar USD 590,48 Juta (naik 14,21% YoY). Namun demikian, pada Januari 2023, ekspornya sedikit mengalami pelemahan sebesar -2,83% YoY menjadi USD 46,18 Juta dari USD 47,53 Juta pada Januari tahun lalu. Pelemahan tersebut disebabkan

oleh penurunan harga SBW di pasar global. Selain faktor harga, beberapa pelaku usaha eksportir yang belum memiliki perijinan Eksportir Terdaftar (ET) SBW juga terancam tidak dapat melakukan ekspor. Hal tersebut sesuai dengan regulasi tata niaga ekspor SBW yang mewajibkan adanya instrumen ET. Adapun kebijakan pengaturan melalui ET tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan akses pasar RRT terhadap SBW asal Indonesia. Secara lebih rinci, kronologi pengaturan ekspor SBW disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut.



**Gambar 1. Kronologi Pengaturan Ekspor SBW**

Sumber: Berbagai Sumber (2023), diolah



- Pada tahun 2010, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai pasar utama dunia menerapkan kebijakan larangan impor sementara atas produk SBW asal Indonesia. Larangan tersebut disebabkan oleh kandungan nitrit tinggi pada sebagian besar produk SBW Indonesia yang dianggap berbahaya dan disinyalir menjadi penyebab terjadinya kasus kematian warga negara RRT setelah mengonsumsi SBW.
- Sebagai upaya untuk membuka kembali akses ekspor produk SBW Indonesia ke pasar RRT, Pemerintah Indonesia dan RRT menandatangani *Protocol of Inspection, Quarantine and Hygiene Requirements for the Importation of Bird Nest Products from Indonesia to China* (Protokol SBW), yang ditandatangani pada 2012 dan kemudian dilanjutkan dengan serangkaian proses negosiasi. Protokol tersebut mengatur mengenai standar keamanan pangan, Standar Operasional Prosedur (SOP) manajemen produksi, ketelusuran (*traceability*) melalui registrasi dan *approval number* dari *Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China* (CNCA-AQSIQ).
- Atas dasar Protokol tersebut, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor SBW ke RRT pada 27 Juli 2012. Melalui Permendag tersebut, Pemerintah Indonesia secara resmi mengatur tata niaga ekspor SBW ke RRT melalui instrumen ET. Hal itu dilakukan untuk meyakinkan Pemerintah RRT terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan dan higienitas produk SBW yang diekspor.
- Setelah proses negosiasi yang dilaksanakan kurang lebih selama empat tahun, Pemerintah RRT membuka kembali akses pasar impor SBW Indonesia dengan keluarnya persetujuan *General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine* (AQSIQ)/Badan Karantina RRT melalui surat resmi yang disampaikan kepada KBRI Beijing. Pembukaan akses pasar kembali tersebut secara resmi mulai berlaku pada 20 November 2014.
- Selama penutupan akses pasar RRT yang kemudian diikuti dengan pengaturan ekspor khusus ke RRT, terdapat indikasi bahwa ekspor SBW Indonesia justru dilakukan melalui negara ketiga. Ekspor produk dilakukan dalam keadaan kotor (*raw* dan *uncleaned*), untuk kemudian diproses lebih lanjut di negara ketiga, dan selanjutnya diekspor ke RRT. Hal ini menyebabkan ekspor berpotensi dilakukan secara *undervalued* dan nilai tambah justru dinikmati negara lain.
- Untuk mengoptimalkan devisa hasil ekspor, pemerintah memberlakukan larangan ekspor SBW dalam keadaan kotor melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26 Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan/Pengeluaran SBW ke dan dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan ketentuan larangan ekspor SBW kotor dan untuk mencegah ekspor dilakukan secara *undervalued*, tata niaga ekspor melalui instrumen ET diperluas bukan hanya ke negara RRT, namun juga ke negara selain RRT. Ketentuan tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2022 berdasarkan Permendag No. 19 Tahun 2021.
- Dalam rangka pemberian ruang bagi pelaku ekspor untuk memenuhi persyaratan ET-SBW khususnya pada masa transisi, Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan relaksasi berupa pemberian diskresi bagi eksportir SBW yang melakukan ekspor ke negara tujuan selain RRT. Diskresi tersebut tercantum pada Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No. 1625 Tahun 2021. Berdasarkan Kepmendag tersebut, eksportir dapat mengajukan permohonan ET Sementara dengan hanya melampirkan Surat Pernyataan Mandiri (SPM). SPM tersebut memuat beberapa informasi berupa profil perusahaan, sumber bahan baku, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja dan peralatan produksi. Kebijakan diskresi tersebut berlaku hingga 31 Desember 2022.

Dengan berakhirnya masa diskresi, maka berdasarkan Permendag No. 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor, tata niaga ekspor SBW budidaya (HS ex. 04010.00.10), baik yang ditujukan ke Negara RRT maupun selain

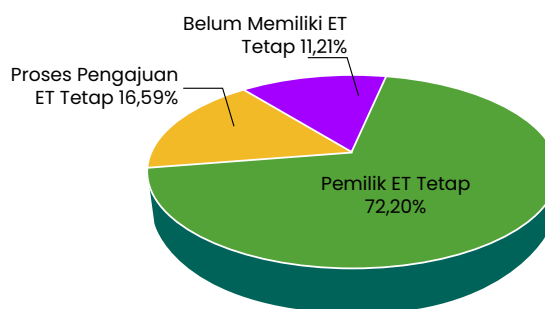
RRT seluruhnya diatur melalui instrumen Eksportir Terdaftar (ET) dengan persyaratan utamanya berupa Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Instalasi Karantina Hewan/Tempat Tindakan Karantina (IKH/TTK) seperti yang disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 3. Tata Niaga Ekspor Sarang Burung Walet (SBW)**

Uraian	SBW Habitat Buatan (Budidaya)
Kode HS	ex. 0410.00.10 dari Habitat Buatan (budidaya)
Negara Tujuan	Seluruh Negara
Perijinan Ekspor	1. Eksportir Terdaftar (ET)–SBW 2. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) untuk setiap pengiriman ekspor.
Pengecualian	Dikecualikan dari kewajiban ET–SBW ( <b>tetap wajib KH12</b> ): 1. Barang Bawaan Penumpang/Awak Sarana Pengangkut (ASP), barang pelintas batas < 250 gr. 2. Barang Kiriman < 250gr. 3. Barang Keperluan Penelitian. Ekspor menggunakan Surat Keterangan Kemendag disertai Pertimbangan Teknis. 4. Barang Keperluan Pameran. Ekspor menggunakan Surat Keterangan dengan Pertimbangan Teknis K/L, Pemerintah Daerah, Perwakilan Republik Indonesia.
Persyaratan ET–SBW	1. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dengan masa berlaku lima tahun, namun pengawasan ( <i>surveillance</i> ) dilakukan setiap satu tahun. 2. Sertifikat Instalasi Karantina Hewan (IKH) yang berlaku selama 5 tahun <b>atau</b> Keputusan Tempat Tindakan Karantina (TTK) yang berlaku selama enam bulan.  Masa berlaku ET SBW adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor SBW.

Sumber: Permendag No. 19 Tahun 2021

Berdasarkan data kepemilikan dan pengajuan ET, sebagian besar pelaku usaha eksportir SBW telah memiliki ET. Sebanyak 72,20% eksportir SBW telah memiliki ET dan sebanyak 16,59% eksportir sedang dalam proses pengajuan dan segera dapat diterbitkan ET-nya. Namun demikian, masih terdapat sekitar 11,21% eksportir khususnya UMKM yang belum memiliki ET dan berpotensi terdampak dan terhambat kinerja ekspornya dengan adanya kewajiban ET bagi ekspor SBW ke semua negara tujuan (Gambar 2).



**Gambar 2. Distribusi Kepemilikan ET–Tetap per tanggal 14 Maret 2023**

Sumber: Dit. Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan (2023), diolah



Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pelaku usaha eksportir, pengurusan sertifikasi NKV dan IKH/TTK yang menjadi persyaratan dalam memperoleh ET memerlukan waktu dan biaya yang besar terutama untuk memenuhi beberapa persyaratan teknis seperti pemenuhan higienitas sarana dan prasarana serta ketersediaan penanggung jawab teknis. Selain persyaratan teknis, diperlukan pula biaya tambahan untuk pengawasan (*surveillance*) yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Lamanya waktu dan

besarnya biaya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan beberapa pelaku eksportir khususnya UMKM belum memiliki dokumen NKV dan IKH/TTK yang diperlukan dalam pengurusan ET sebagai dokumen wajib untuk ekspor. Oleh karena itu, terhadap isu permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu mekanisme kebijakan yang dapat memberikan kemudahan khususnya dalam hal perizinan ekspor khususnya bagi para UMKM eksportir yang berpotensi terhambat ekspornya.




## Rekomendasi Kebijakan

Dengan adanya potensi terhambatnya ekspor SBW oleh pelaku usaha yang belum memiliki ET khususnya UMKM, maka rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha ekspor UMKM, khususnya sekitar 11,21% eksportir SBW yang saat ini belum memiliki NKV dan IKH/TTK, dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan ET melalui Surat Pernyataan Mandiri (SPM). Kebijakan tersebut pernah dilaksanakan pada masa diskresi yaitu pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, sehingga implementasi kebijakan tersebut relatif akan lebih mudah, baik dari sisi sistem maupun dari sisi pelaku usaha.
2. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan penyederhanaan persyaratan ET adalah sebagai berikut:
  - a. Kebijakan penyederhanaan ET melalui SPM hanya ditujukan bagi ekspor ke negara selain RRT.
  - b. Pemerintah melalui instansi terkait dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/klarifikasi terhadap SPM pelaku usaha ekspor SBW.
  - c. Ekspor SBW tetap wajib disertai dengan dokumen sanitasi (KH-12) untuk menjaga keamanan ekspor produk pangan dan menghindari ekspor SBW dilakukan dalam bentuk kotor (*raw* dan *uncleaned*).
  - d. ET harus disertai kewajiban pelaporan realisasi ekspor yang disampaikan melalui sistem *Inatrade* sebagai upaya *monitoring* dan mengurangi potensi ekspor secara *undervalued*.
  - e. Tersedianya program pendampingan yang mendorong pelaku usaha eksportir SBW khususnya UMKM untuk dapat memiliki sertifikat NKV dan IKH/TTK dalam rangka meningkatkan daya saing produk.

### Biodata Penulis



-  Septika Tri Ardiyanti, S.Si., M.Sc.
-  Analis Perdagangan Ahli Muda
-  [septika.ardiyanti@kemendag.go.id](mailto:septika.ardiyanti@kemendag.go.id)

# Lima Tahun Pasca Implementasi Kebijakan *Post Border*: Peluang dan Tantangan

Pemerintah Indonesia menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XV tentang pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik yang diluncurkan pada tahun 2017. Salah satu isi paket kebijakan tersebut adalah penyederhanaan tata niaga dalam wujud penyederhanaan tata niaga ekspor impor untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan. Pemerintah menindaklanjuti dengan melakukan pergeseran tata niaga impor yang pengawasannya dilakukan di *border* menjadi *post border*. Artinya, pemeriksaan pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melewati daerah pabean. Kebijakan *post border* berlaku efektif sejak 1 Februari 2018 melalui Permendag Nomor 28 tahun 2018 yang terakhir direvisi menjadi Permendag Nomor 51 tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (*post border*).

## Kebijakan *Post Border* Memperlancar Arus Barang di Pelabuhan

Perubahan kebijakan pengawasan produk impor di *post border* dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar proses bongkar muat barang di pelabuhan hingga masuk ke dalam daerah pabean, serta meningkatkan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Produk yang diawasi melalui penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan di *post border* terdiri dari 25 kelompok produk, diantaranya Barang Modal Tidak Baru, Ban, dan Produk Kehutanan. Mekanisme pemeriksaan *post border* dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor (LS). Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban atas kelengkapan dokumen Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dan Ijin Tipe.

Kebijakan *Post Border* yang terbit di tahun 2017 dipicu oleh lamanya waktu proses bongkar muat barang di pelabuhan, sebagai catatan saat itu, *dwelling time* di beberapa pelabuhan di Indonesia berkisar antara 5-7 hari. *Dwelling time* mengalami perbaikan menjadi 2-2,5 hari pada tahun 2022.

Kementerian Perdagangan bersama kementerian dan lembaga teknis lainnya memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan barang impor di luar kawasan pabean. Khusus di lingkungan Kementerian Perdagangan, penyelenggaraan pengawasan *post border* dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang didukung oleh keberadaan Balai Pengawasan Tertib Niaga. Untuk keperluan pemeriksaan, data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) siap inspeksi (belum memenuhi ketentuan) diperoleh dari data target pemeriksaan pada sistem *e-reporting* yang dikelola oleh Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI). Selanjutnya data tersebut diolah menggunakan data PIB dari Indonesia *National Single Window* (INSW) yang divalidasi dengan data dari Sistem Informasi Perdagangan (INATRADE).

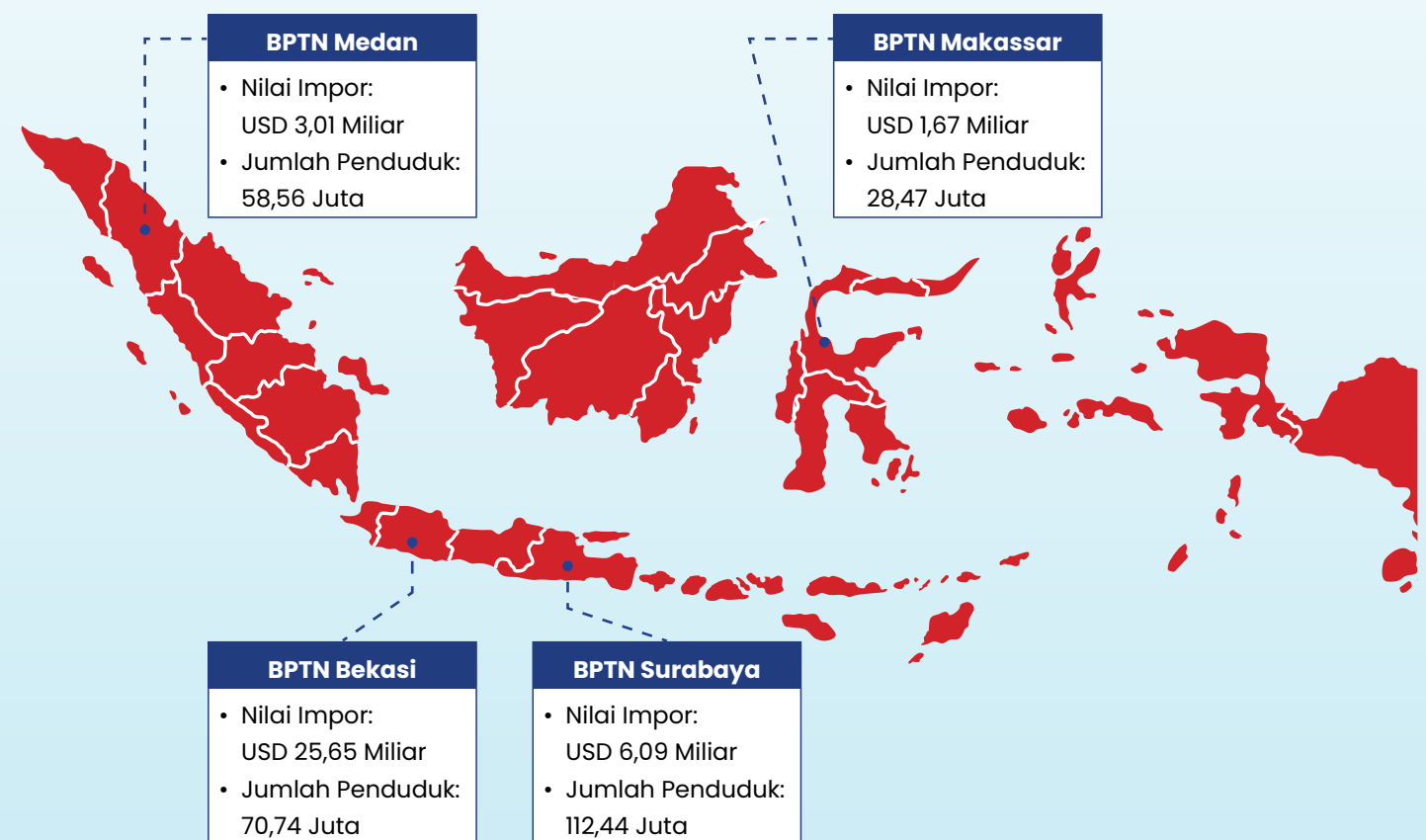
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN),





saat ini telah berdiri BPTN di empat kota, yaitu Medan, Bekasi, Surabaya, dan Makassar. Masing-masing kota tersebut membawahi wilayah kerja yang menjadi kewenangan operasional pengawasan. BPTN di kota Medan memiliki wilayah kerja di seluruh wilayah Pulau Sumatera; BPTN di kota Bekasi membawahi wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat,

dan Banten; BPTN di kota Surabaya memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI.Yogyakarta, Pulau Kalimantan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Serta BPTN di kota Makassar memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.



**Gambar 1. Peta Nilai Impor Produk *Post Border* dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Lingkup Pengawasan BPTN**

Sumber: BPS (Maret 2023), diolah Puska EIPP

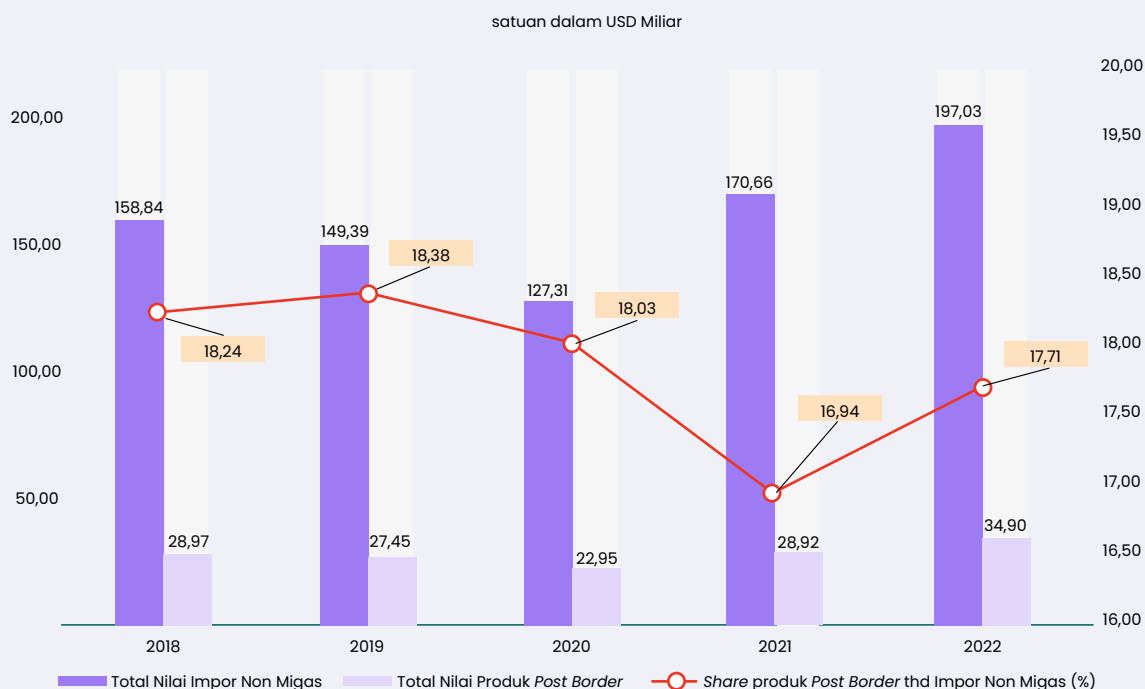
Keberadaan BPTN memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan barang impor terkait kebijakan *post border* dengan tanggung jawab yang menyertai. Pada Gambar 1 terlihat bahwa berdasarkan Sensus Penduduk 2020, BPTN Surabaya menjadi yang terbesar dalam mengawasi penduduk yang juga merupakan konsumen bagi produk impor dengan jumlah penduduk sebanyak 112,44 Juta. Berikutnya adalah BPTN Bekasi, walaupun wilayah kerjanya hanya meliputi tiga provinsi, namun jumlah penduduk yang perlu dilindungi dari dampak buruk barang impor mencapai 70,74 Juta jiwa.

Sementara itu, nilai impor produk yang terkena kebijakan *post border* berdasarkan wilayah kerja BPTN terbesar adalah BPTN Bekasi dengan nilai impor di tahun 2022 mencapai USD 25,65 Miliar. Tingginya nilai impor tersebut disebabkan Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pintu gerbang utama arus keluar masuk barang. Nilai impor untuk produk *post border* terbesar berikutnya di tahun 2022 adalah BPTN Surabaya, BPTN Medan, dan BPTN Makassar dengan nilai impor masing-masing sebesar USD 6,09 Miliar, USD 3,01 Miliar, dan USD 1,67 Miliar.

## Perkembangan Impor Melalui Pengawasan *Post Border*

Pasca implementasi kebijakan pengawasan impor melalui mekanisme *post border*, perkembangan kinerja impor non migas Indonesia mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari angka tren pertumbuhan impor non migas selama 2018–2022. Pada periode tersebut,

impor non migas Indonesia naik rata-rata 5,8% per tahun (Gambar 2). Selama dua tahun terakhir, impor non migas menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, yakni tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 34,05% dibanding tahun 2020, dari USD 127,31 Miliar menjadi USD 170,66 Miliar. Di tahun berikutnya, nilai impor non migas tahun 2022 tercatat mencapai USD 197,03 Miliar atau naik 15,45% (YoY).



**Gambar 2. Perkembangan Impor Non Migas Indonesia dan Produk *Post Border***

Sumber: BPS (Maret 2023), diolah Puska EIPP

Kontribusi nilai impor produk yang diawasi melalui mekanisme *post border* tahun 2022 terhadap impor non migas Indonesia naik menjadi 17,71% dari tahun 2021 sebesar 16,94% (Gambar 2). Peningkatan ini dipicu oleh naiknya

impor produk *post border* sebesar 20,69% (YoY) menjadi USD 34,90 Miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2020, impor produk *post border* mengalami penurunan dibanding tahun 2019 karena adanya pandemi Covid-19.



**Tabel 1. Perkembangan Impor Produk yang Dikenakan Kebijakan Pengawasan *Post Border* Periode 2018–2022**

No	Produk	Nilai Impor: USD Juta						Tren 2018–2022 (%)	Pertumbuhan (22/21)	Pangsa 2022
		2018	2019	2020	2021	2022	Jan 2022	Jan 2023		
1	Barang Modal Tidak Baru	14.476,06	12.631,06	9.969,43	12.418,66	15.831,61	1.249,54	1.500,62	1,63	27,48
2	Produk Tertentu/Elektronika	2.552,65	2.591,70	2.346,93	3.376,20	3.836,95	417,11	224,34	11,40	10,99
3	Produk Kehutanan	2.208,95	2.226,70	1.683,97	2.006,72	2.446,33	173,99	174,85	1,01	21,91
4	Hewan dan Produk Hewan	1.683,79	1.907,02	1.828,47	2.292,15	2.985,24	123,42	166,59	14,22	30,24
5	Produk Tertentu / Makanan dan Minuman	1.112,14	1.180,78	1.130,46	1.346,09	1.626,81	129,62	147,53	9,33	20,85
6	Bahan Baku Plastik	1.271,30	1.116,76	963,68	1.440,13	1.523,32	150,47	123,43	6,35	5,78
7	Produk Horti ultura termasuk bawang putih	1.529,35	1.760,12	1.528,79	1.868,64	1.870,76	98,87	114,80	4,74	0,11
8	Produk Tertentu / Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	546,73	566,17	453,49	515,32	535,68	33,03	45,42	(1,34)	3,95
9	Produk Tertentu / Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya	965,77	1.022,58	958,97	990,46	868,14	68,34	41,86	(2,42)	(12,35)
10	Barang Berbasis Sistem Pendingin	392,48	401,16	364,91	450,83	586,02	40,78	41,35	9,62	29,99
11	Hasil Perikanan	281,47	277,70	244,54	304,96	474,07	21,25	41,32	12,03	55,45
12	Pelumas	319,29	277,25	224,62	444,30	563,86	37,69	39,20	17,46	26,91
13	Produk Tertentu / Alas Kaki	262,79	292,64	208,85	220,02	356,70	27,33	37,47	3,31	62,12
14	Keramik	379,23	332,83	322,03	402,21	408,45	33,96	33,50	3,44	1,55
15	Produk Tertentu / Mainan Anak-Anak	235,61	239,30	169,62	177,25	210,71	14,95	22,56	(5,10)	18,88
16	Sakarín, Siklamat, Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol	93,24	112,44	136,92	157,34	192,52	15,08	16,84	19,55	22,36
17	Produk Tertentu / Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	293,18	250,52	208,78	249,51	248,27	21,34	14,74	(3,31)	(0,50)
18	Ban	157,50	115,42	102,54	138,62	177,62	13,60	8,07	4,33	28,13
19	Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna	141,03	93,93	58,76	66,47	84,12	6,98	7,65	(12,88)	26,55
20	Kaca Lembaran	67,12	55,33	42,50	49,49	71,20	5,07	5,22	0,06	43,85
21	Semen	1,94	0,09	0,10	0,15	0,14	0,01	0,01	(38,10)	(8,08)
22	Perkakas Tangan (Setengah Jadi)	0,57	1,14	0,92	0,97	0,07	0,03	0,00	(35,40)	(92,84)
23	Muara	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	14,72	196,68
24	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
25	Intan Kasar	0,23	0,13	0,16	0,28	0,27	0,02	-	11,76	(4,45)
<b>TOTAL NILAI PRODUK POST BORDER</b>		<b>28.969,67</b>	<b>27.451,40</b>	<b>22.948,26</b>	<b>28.915,38</b>	<b>34.898,38</b>	<b>2.682,41</b>	<b>2.807,34</b>	<b>4,33</b>	<b>20,69</b>
										<b>100,00</b>

Sumber: BPS (Maret 2023), diolah Puska EIPP

Perkembangan impor atas 25 kelompok produk yang dikenakan kebijakan pengawasan *post border* selama lima tahun terakhir (2018–2022) menunjukkan tren positif sebesar 4,33% per tahun. Kinerja impor produk *post border* selalu didominasi oleh Barang Modal Tidak Baru sejak tahun 2018. Pada Januari tahun 2022, nilai impor Barang Modal Tidak Baru senilai USD 15,83 Miliar atau meningkat signifikan sebesar 27,48% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, impor Barang Modal Tidak Baru memberikan kontribusi 45,36% terhadap total impor produk *post border* (Tabel 1).

Pada urutan kedua, impor Produk Tertentu (Elektronika) memberikan pangsa sebesar 10,99% terhadap impor produk *post border* atau sebesar USD 3,83 Miliar. Selanjutnya Produk Kehutanan dengan pangsa 7,01% dan nilai impor USD 2,45

Miliar pada tahun 2022 (Tabel 1). Sementara komoditas yang mengalami peningkatan tahun 2022 adalah Mutiara dengan kenaikan 196,68% (YoY). Sedangkan Perkakas Tangan (Setengah Jadi) menjadi komoditas yang mengalami penurunan impor paling tinggi sebesar 92,84% (YoY).

Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan barang impor terkait *post border* dimulai saat Direktorat Tertib Niaga menerima data notifikasi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada sistem *e-reporting*. Diperlukan waktu sekitar 30 hari untuk memeriksa potensi terjadinya pelanggaran. Jika ditemukan pelanggaran, maka petugas pengawas akan melakukan inspeksi ke lapangan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan terjadinya pelanggaran, maka dapat dilakukan *clearance* barang impor dengan dilengkapi laporan *analyzing point*.

Implementasi kebijakan *post border* menemui beberapa kendala, salah satunya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan cakupan wilayah pemeriksaan yang luas dan cakupan produk yang banyak. Kendala tersebut menyebabkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan barang *post border* kurang optimal, mengingat proses koordinasi serta area pengawasan yang luas hingga ke

luar pulau. Beberapa jenis pelanggaran yang sering ditemukan adalah belum adanya surat keterangan pengecualian wajib LS, tidak adanya dokumen PI, kesalahan pelabuhan masuk impor, ketidaksesuaian volume dan barang, serta terkait pemenuhan persyaratan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L). Hal ini antara lain disebabkan kurangnya literasi dan edukasi pada importir terhadap ketentuan prosedur impor.

**Tabel 2. Persentase Pelanggaran Produk Impor *Post Border* Tahun 2021 dan 2022**

Komoditas	Total yang Diperiksa				Jumlah Melanggar				Persentase Pelanggaran (%)			
	2021		2022		2021		2022		2021		2022	
	PIB	Importir	PIB	Importir	PIB	Importir	PIB	Importir	PIB	Importir	PIB	Importir
Bahan Baku Plastik	60	12	44	12	37	3	4	2	61,7	25,0	9,1	16,7
Ban	-	-	29	11	-	-	18	7	-	-	62,1	63,6
Barang Berbasis Sistem Pendingin	92	15	29	16	2	2	2	1	2,2	13,3	6,9	6,3
Barang Modal Tidak Baru	129	81	115	62	21	13	26	13	16,3	16,0	22,6	21,0
Hasil Perikanan	101	33	60	20	18	6	3	2	17,8	18,2	5,0	10,0
Hortikultura (termasuk Bawang Putih)	300	31	328	35	27	4	15	3	9,0	12,9	4,6	8,6
Intan Kasar	-	-	3	1	-	-	0	0	-	-	-	-
Kaca Lembaran	16	8	5	1	1	1	0	0	6,3	12,5	-	-
Keramik	78	20	38	12	11	2	12	4	14,1	10,0	31,6	33,3
Mesin Multifungsi Fotokopi dan Printer Berwarna	9	8	5	2	2	2	0	0	22,2	25,0	-	-
Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi	66	39	71	32	14	6	58	25	21,2	15,4	81,7	78,1
Pelumas	5	2	5	2	0	0	1	1	-	-	20,0	50,0
Perkakas Tangan	2	2	-	-	2	2	-	-	100,0	100,0		
Produk Hewan	115	17	74	11	0	0	53	6	-	-	71,6	54,5
Produk Kehutanan	516	73	187	49	96	20	70	21	18,6	27,4	37,4	42,9
Produk Tertentu (Alas Kaki)	30	12	9	6	1	1	2	2	3,3	8,3	22,2	33,3



Produk Tertentu (Elektronik)	128	64	82	42	44	17	35	18	34,4	26,6	42,7	42,9
Produk Tertentu (Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan)	-	-	23	18	-	-	18	15	-	-	78,3	83,3
Produk Tertentu (Mainan Anak-Anak)	15	11	7	6	1	1	3	3	6,7	9,1	42,9	50,0
Produk Tertentu (Makanan dan Minuman)	125	31	92	34	36	6	51	15	28,8	19,4	55,4	44,1
Produk Tertentu (Suplemen Kesehatan)	42	14	20	8	6	3	9	6	14,3	21,4	45,0	75,0
Sakarin Siklamat dan Preparat Bau-Bauan Mengan	42	16	14	4	6	3	4	2	14,3	18,8	28,6	50,0
<b>Grand Total</b>	<b>1.871</b>	<b>489</b>	<b>1.240</b>	<b>384</b>	<b>325</b>	<b>92</b>	<b>384</b>	<b>146</b>	<b>17,4</b>	<b>18,8</b>	<b>31,0</b>	<b>38,0</b>

Sumber: Kementerian Perdagangan (2023)

Ket: PIB dan Importir menunjukkan jumlah

Salah satu bentuk pelanggaran yang cukup banyak ditemui adalah pelaku usaha mengubah data *Harmonized System* (HS) produk, sehingga produk impor yang awalnya dikenakan barang larangan dan/atau pembatasan (Lartas) atas impornya menjadi tidak terdeteksi. Hal ini dinilai merupakan salah satu titik kelemahan pengawasan *post border* sebab produk impor dapat dengan mudah melewati kawasan pabean. Bagi beberapa pihak tertentu hal ini dapat menguntungkan karena mudahnya memasukkan barang impor tanpa kendali yang ketat, bahkan tidak dikenakan bea masuk. Untuk itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terkait implementasi kebijakan dengan *stakeholder* terkait hal ini, karena menyangkut persoalan pengamanan pasar dalam negeri, perlindungan konsumen, dan berakibat kerugian negara.

Sebagai tindak lanjut pengawasan yang dilakukan, bagi importir yang belum memenuhi ketentuan dan terbukti melakukan pelanggaran,

Direktorat Tertib Niaga memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam implementasinya, sanksi administratif yang diutamakan, dengan perlu memperhatikan jenis dan keparahan pelanggaran yang dilakukan. Adapun sanksi lainnya dapat berupa, peringatan beserta pemusnahan barang impor, pemblokiran izin impor, dan yang paling berat adalah sanksi pidana. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi importir yang tidak taat ketentuan.

Secara total, dari 1.240 jumlah PIB kepada 384 pelaku usaha yang diperiksa melalui mekanisme *post border* pada tahun 2022 (Tabel 2), sebanyak 31% diantaranya terbukti terjadi pelanggaran. Beberapa produk memiliki angka pelanggaran yang cukup besar, yakni lebih dari 50%, diantaranya adalah Ban, Produk Hewan, Pakaian Jadi, dan Aksesori Pakaian Jadi, Produk Tertentu Berupa Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya, Produk Tertentu – Kosmetik, serta Produk Tertentu Makanan dan Minuman. Dibandingkan

tahun 2021, total persentase pelanggaran dari jumlah PIB tahun 2022 yang diperiksa mengalami peningkatan pelanggaran sebesar 78,28%.

Dari hasil pengawasan empat wilayah BPTN di Indonesia (Medan, Bekasi, Surabaya dan Makassar), yang belum memenuhi ketentuan pemenuhan PI, dan/atau LS dan telah ditindaklanjuti melalui pemberian Surat Peringatan sebanyak 55 Pelaku Usaha, Surat permintaan pemblokiran akses kepabean ke Ditjen BC sebanyak tujuh Pelaku Usaha), Surat perintah penarikan dan pemusnahan barang sebanyak 19 Pelaku Usaha), serta terdapat yang masih belum diberikan sanksi final sebanyak delapan Pelaku Usaha), dan belum diverifikasi sebanyak tiga Pelaku Usaha.

Dengan berlakunya kebijakan *post border*, maka pemeriksaan terhadap dokumen perizinan impor




dan pemeriksaan fisik barang impor dilakukan ketika barang sudah berada di kawasan pabean. Kebijakan ini menimbulkan risiko barang impor masuk dengan ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen persyaratan impor. Selain itu, adanya potensi terjadinya kebocoran barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dapat bebas beredar di pasar dalam negeri sebelum dilakukan pemeriksaan sehingga menimbulkan gangguan terhadap pasar domestik. Dengan kata lain, muncul risiko barang impor yang diedarkan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), bahkan berpotensi mengancam keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup.

## Rekomendasi Kebijakan



1. Mengacu pada data, untuk produk yang memiliki angka pelanggaran yang cukup besar, yakni lebih dari 50%, diantaranya adalah Ban, Produk Hewan, Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi, Produk Tertentu Berupa Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya, Produk Tertentu – Kosmetik, serta Produk Tertentu Makanan dan Minuman, dapat dipertimbangkan untuk dikembalikan pemeriksaannya di *border*.
2. Mengingat pentingnya peran BPTN dalam melakukan pengawasan barang impor yang terkena kebijakan *post border*, diperlukan kebijakan untuk memperkuat kelembagaan BPTN melalui penambahan kantor yang saat ini baru berjumlah empat kantor BPTN yaitu di Medan, Bekasi, Surabaya, dan Makassar. Penambahan kantor BPTN secara linier akan menambah jumlah SDM pengawas dan juga penambahan anggaran pendukung dalam rangka perlindungan konsumen.

## Biodata Penulis



 Fairuz Nur Khairunnisa, S.E  
 Fasilitator Perdagangan  
 fairuz.nisa33@gmail.com



 Yudi Fadilah, SE, ME  
 Analis Kebijakan Ahli Madya  
 yudi.fadilah@kemendag.go.id



# Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Disparitas Harga Kebutuhan Barang Pokok di Nunukan

Nunukan merupakan salah satu wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan dan merupakan salah satu bagian dari lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan luas wilayah sebesar 14.263,68 km<sup>2</sup>. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Nunukan terletak di wilayah paling utara Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Nunukan sebagai kawasan perbatasan dan terluar menjadi wajah Indonesia bagi negara tetangga sekaligus sebagai pintu keluar masuknya barang dari dan ke luar negeri.

Sebagai wilayah yang berada di perbatasan, Nunukan tentunya memiliki tantangan tersendiri, khususnya dari sisi logistik serta penyediaan komoditas bahan pokok (Bapok). Tantangan dari sisi logistik karena beberapa wilayah di Nunukan hanya bisa diakses melalui udara dan/atau sungai serta belum adanya akses darat yang memadai. Sebagai contoh adalah Jalan lintas Malinau-Krayan dan jalan antar desa di Krayan yang saat ini sebagian besar masih berupa jalan tanah, dan hanya 27 kilometer yang sudah dibangun dari total panjang jalan 206 kilometer. Sementara kapasitas angkutan udara juga terbatas untuk mengangkut barang dari Nunukan dan sekitarnya ke Krayan. Sejauh ini, kapasitas muatan pesawat hanya 600–950 Kg per *trip* untuk pesawat perintis jenis Pilatus atau Cresna Caravan.

Dari sisi penyediaan komoditas bapok, tantangannya adalah harga yang lebih

mahal untuk barang hasil pasokan domestik dibandingkan dengan harga dari negara tetangga yaitu Malaysia. Contohnya harga gula pasir asal Malaysia yang banyak tersedia di Nunukan dengan harga Rp 11.500/Kg, lebih murah dari pasokan domestik yang dijual seharga Rp 14.000/Kg. Selain itu, di pasar juga banyak beredar bawang merah impor dari Tawau Malaysia dengan harga Rp 25.000/Kg, yang lebih murah dari harga bawang merah lokal sebesar Rp 40.000/Kg. Tidak hanya harga, ketersediaan bapok dari sumber pasokan domestik juga belum mencukupi dikarenakan pengiriman logistik dari dalam negeri yang terbatas dengan biaya yang cukup tinggi. Inilah yang menyebabkan disparitas harga bapok di Nunukan cukup tinggi.

Gambaran lebih lanjut terkait adanya disparitas harga bapok antar wilayah dapat dilihat dari perbandingan Margin Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) di tingkat provinsi dan nasional (Gambar 1). MPP merupakan perhitungan biaya distribusi atas pola distribusi yang dihitung dalam nilai jual komoditas. Nilai MPP dihitung berdasarkan rantai distribusi awal dari tingkat produsen hingga ke konsumen tingkat akhir. MPP dapat menggambarkan



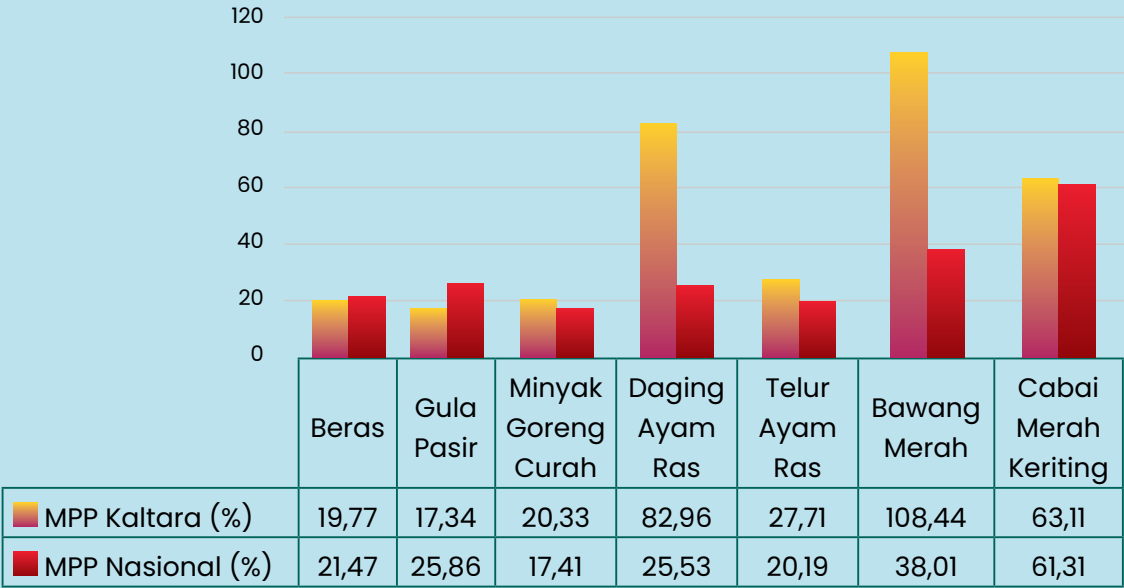




selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian yang mengikutsertakan biaya pengangkutan.

Mengacu kepada publikasi BPS (2020 & 2021) terkait pola distribusi perdagangan komoditas, terdapat lima dari tujuh komoditas di Kalimantan Utara, yaitu minyak goreng curah, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang

merah, dan cabai merah keriting yang memiliki nilai MPP provinsi di atas MPP nasional (Gambar 1). Rasio MPP yang tinggi ini menggambarkan pola distribusi yang panjang dan kurang efisien. Nilai MPP ini masih berpotensi lebih besar lagi jika barang didistribusikan dari kota Tarakan (Kalimantan Utara) ke Kabupaten Nunukan.



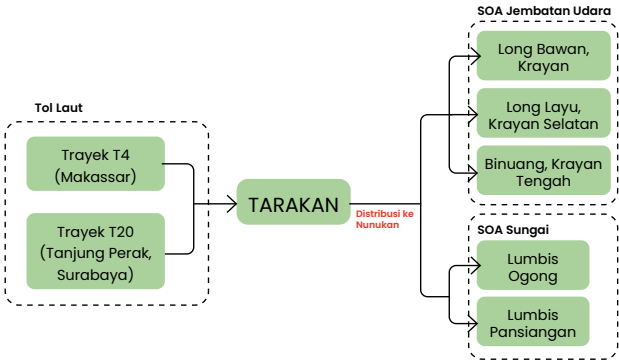
Gambar 1. MPP per Komoditas

Sumber: BPS-Distribusi Perdagangan Komoditas (2020-2021)

### Program Pendukung Distribusi Bapok ke Wilayah Nunukan

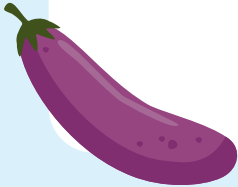
Pasokan bapok yang didistribusikan ke Nunukan utamanya berasal dari Surabaya dan Makassar, serta negara tetangga Malaysia. Ketergantungan Nunukan terhadap wilayah lain dalam hal penyediaan bapok cukup tinggi karena hasil produksi pertanian di Nunukan belum mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Dalam upaya menekan disparitas harga dan

menjaga ketersediaan bapok di Kabupaten Nunukan, saat ini pemerintah setempat telah melaksanakan beberapa program dan kebijakan pendukung berupa program tol laut dan gerai maritim, Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk Jembatan Udara (Jembara), serta SOA *interland* jalur sungai sebagaimana diuraikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Program Pendukung Distribusi Bapok ke Wilayah Nunukan

Sumber: Hasil Survei Puska PD (2022)



Pemanfaatan tol laut untuk muatan angkut bapak di Nunukan mulai meningkat pada 2022 yang ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah *consignee* dan penjual. Jumlah *consignee* di tahun 2022 meningkat menjadi 16 *consignee* dari sebelumnya delapan *consignee* di 2021. Sedangkan jumlah penjual meningkat menjadi lima penjual dari sebelumnya hanya dua penjual di tahun 2021. Dukungan pemerintah dalam hal ini diantaranya dengan memberikan subsidi tarif peti kemas untuk program tol laut, di mana tarif tol laut untuk trayek Surabaya-Nunukan sebesar Rp 4.059.000/*container 20 feet* dan untuk trayek Makassar-Nunukan sebesar Rp 4.634.000/*container 20 feet*. Harga tersebut lebih murah dibandingkan biaya menggunakan kapal Roro yang dapat mencapai Rp 7.850.000/muatan 20 ton.

Meskipun demikian, rute tol laut yang lebih panjang dan waktu pengiriman yang lebih lama dibandingkan kapal operator swasta masih menjadi faktor penghambat pemanfaatan program tol laut. Sebagian pelaku usaha masih lebih memilih mengirimkan barangnya melalui kapal swasta karena lebih cepat. Pengiriman dengan tol laut membutuhkan waktu sekitar empat minggu untuk rute Nunukan-Surabaya, sementara pengiriman barang dari Makassar dengan kapal swasta hanya berkisar tiga sampai lima hari.

Selain subsidi tol laut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan juga memberikan subsidi intermoda untuk jembatan udara (Jembara) dan *interland* melalui jalur sungai untuk beberapa kecamatan di wilayah Nunukan yang aksesnya sulit untuk ditempuh. Adapun besaran masing-masing subsidi sebagai berikut:

a. SOA sebesar Rp 50.000/Kg *round trip* melalui dana APBD Kabupaten Nunukan untuk jalur Jembara di tiga kecamatan pada wilayah dataran tinggi Krayan, diantaranya Kecamatan Long Bawan, Long Layu, dan Binuang. Sebagai muatan balik, dataran

tinggi Krayan menghasilkan beras organik premium yang menjadi komoditas ekspor ke negara tetangga.

b. SOA sebesar Rp 5.500/Kg – 10.800/Kg yang disesuaikan dengan jarak tempuh untuk Kecamatan Lumbis Ogong dan Lumbis Pansiangon yang menggunakan jalur sungai.

### Perdagangan Perbatasan Melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Saat ini perdagangan perbatasan di Nunukan melalui PLBN belum dioperasikan dan mekanismenya akan mengikuti Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (*Border Trade Agreement/BTA*) Tahun 1970 dengan limit transaksi pembelian sebesar 600 Ringgit Malaysia (MYR)/orang/bulan atau sekitar Rp 2.000.000/orang/bulan (dikonversi dengan kurs 1 MYR = Rp 3.233,79). Pada dasarnya BTA tersebut mengatur perdagangan di perbatasan yang meliputi definisi perdagangan lintas batas, pelaku perdagangan lintas batas, dan jenis serta nilai barang/produk. Adapun kendala yang masih sering dihadapi di lapangan adalah masih banyaknya indikasi perdagangan ilegal dari Malaysia yang sulit untuk diawasi dengan kondisi geografis wilayah Nunukan.

PLBN Sebatik yang berada di Nunukan telah dibangun oleh Pemerintah Indonesia dan sudah siap untuk diresmikan. Namun demikian, kegiatan operasional di PLBN Sebatik belum bisa berjalan mengingat pemerintah Malaysia belum memberikan persetujuan Tawau sebagai *entry poin* dari PLBN Indonesia. Dengan demikian, efektifitas PLBN dalam mendukung ketersediaan pasokan dan menurunkan disparitas harga di wilayah perbatasan belum dapat dirasakan. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan perlu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk dapat menindaklanjuti operasionalisasi PLBN Sebatik sehingga dapat mendukung aktivitas perdagangan.



**Gambar 3. PLBN Sebatik Nunukan**

Sumber: Hasil Survei Puska PD (2022)

## Kebijakan Pemerintah untuk Stabilisasi Harga Bapok di Nunukan

Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan disparitas dan menjaga stabilitas harga bapok di Nunukan. Kabupaten Nunukan merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam jalur/trayek tol laut, namun pelaksanaan tol laut dan gerai maritim belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini dikarenakan frekuensi dan jadwal kapal tol laut yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha sehingga menyebabkan relatif terbatasnya pemanfaatan tol laut di Nunukan. Padahal, melalui program tol laut harga bapok pasokan domestik dapat lebih bersaing dengan produk Malaysia, karena selisih harga keduanya menjadi lebih kecil dibandingkan sebelumnya.

Contohnya, selisih harga antara beras medium lokal dengan beras asal Malaysia yang dijual oleh pelaku usaha yang mengikuti program tol laut dapat turun dari 55% menjadi 33% (harga beras non tol laut: Rp 14.000/Kg; harga beras tol laut: Rp 12.000/Kg; harga beras asal Malaysia Rp 9.000/Kg).

Selain itu, tol laut juga banyak dimanfaatkan untuk mengangkut barang lainnya seperti mie instan dan makanan ringan sehingga berdampak positif terhadap pangsa pasar produk lokal.

Pada wilayah yang hanya dapat diakses melalui jalur udara, pemerintah melaksanakan program Jembara untuk tiga kecamatan di kawasan dataran tinggi Krayan Kabupaten Nunukan. Program Jembara terbukti mampu menurunkan harga bapok, misalnya gula pasir turun sebesar 40,62% (harga Jembara Rp 19.000/Kg vs non Jembara Rp 32.000/Kg) dan tepung terigu turun sebesar 45,45% (harga Jembara Rp 18.000/Kg vs non Jembara Rp 33.000/Kg) (Sistem Informasi Gerai Maritim (SIGM), Oktober 2022).

Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk komoditas bapok melalui penugasan kepada BUMN/BUMD sebagai upaya menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga. Namun sayangnya,

pemerintah daerah terkait masih merasa peran BUMD dalam hal ini BULOG, belum optimal dalam menjaga ketersediaan pasokan bapak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Salah satu contohnya adalah produk Minyak Goreng Rakyat (MGR) dengan merek Minyakita. Produk Minyakita belum tersedia di Nunukan sehingga masyarakat belum dapat membeli minyak goreng sesuai HET

sebesar Rp 14.000/liter (Penetapan HET sesuai Permendag No. 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat). Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya keberadaan BULOG yang hanya ada di Kota Tarakan. Dengan demikian, dibutuhkan biaya logistik tambahan untuk pendistribusian barang ke Nunukan sehingga harga jual ke konsumen menjadi lebih mahal.

## Rekomendasi Kebijakan

Persoalan disparitas harga untuk daerah perbatasan yang sulit diakses dan hanya dapat diakses melalui udara dan/atau sungai sangat membutuhkan intervensi dari pemerintah. Strategi dan upaya pemerintah dalam menurunkan disparitas harga dan menjaga pasokan bapak di Nunukan dapat ditindaklanjuti antara lain melalui:

1. Penataan regulasi di daerah untuk memperkuat implementasi sistem logistik daerah yang menyediakan data pangan (harga dan stok) serta terintegrasi dengan Pusat Distribusi Provinsi (PDP);
2. Mendorong kolaborasi antara Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan jejaring pengusaha ritel dalam penetrasi pasar dan distribusi bapak di Nunukan;
3. Mengoptimalkan peran BUMN/BUMD sebagai penyangga pangan melalui koordinasi dengan Badan Pangan Nasional. Terkait hal ini, perlu kajian lebih lanjut untuk penyimpanan cadangan stok pangan pokok di daerah perbatasan dan terluar yang dikelola oleh BULOG dan atau BUMN untuk mengantisipasi ketergantungan alternatif pasokan dari Malaysia;
4. Mendorong tindak lanjut pelaksanaan PLBN di Sebatik melalui negosiasi bilateral dengan Malaysia untuk mengurangi perdagangan ilegal;
5. Mempertimbangkan peningkatan trayek angkutan subsidi di daerah perbatasan sesuai dengan kebutuhan moda transportasi.

## Biodata Penulis



Niche Evandani, M.M.



Analisis Kerja Sama



niche.evandani@kemendag.go.id



Yati Nuryati, S.Pi., M.Si.

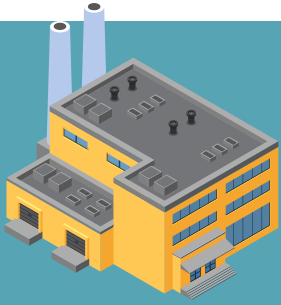


Analisis Perdagangan Ahli Muda



y\_nuryati@yahoo.com





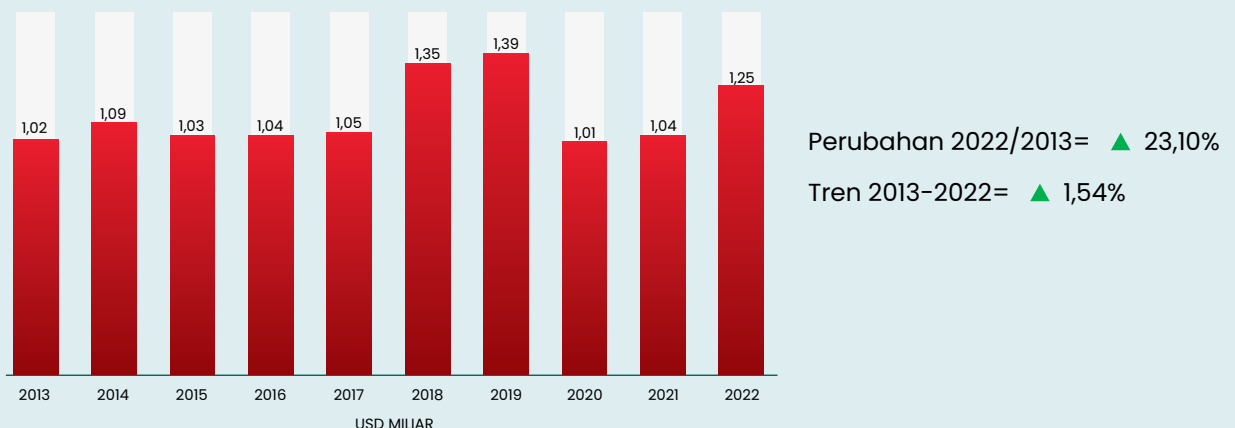
# Indonesia Perjuangkan Ekspor Kertas A4 ke Australia

Australia merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor kertas A4 Indonesia. Namun, sejak tahun 2017 Australia menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap kertas A4 Indonesia. Dampaknya, ekspor komoditas tersebut ke Australia mengalami penurunan. Saat ini Indonesia sedang dalam proses menyampaikan pembelaan atas pengenaan BMAD tersebut kepada Pemerintah Australia.

## Kinerja Ekspor Kertas A4 ke Australia

Indonesia adalah eksportir kertas A4 (HS 480256) ke berbagai negara di dunia. Pada tahun 2022

ekspor Indonesia tumbuh 23,10% bila dibandingkan dengan ekspor Indonesia pada tahun 2013. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa ekspor kertas A4 Indonesia ke dunia memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 1,54% per tahun pada 2013-2022 (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa produk kertas A4 Indonesia diminati oleh negara-negara di dunia. Meskipun ekspornya sempat menurun pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021, namun tidak berlangsung lama. Pada tahun 2022, ekspor kertas A4 Indonesia kembali meningkat.



**Gambar 1. Nilai Ekspor Kertas A4 Indonesia ke Dunia**

Sumber: BPS (2023), diolah

Australia merupakan negara yang relatif dekat dengan Indonesia dan merupakan pasar potensial bagi produk kertas A4 asal Indonesia. Sebelum Australia menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap kertas A4 asal Indonesia pada tahun 2017, Australia merupakan negara tujuan ekspor kertas A4 Indonesia terbesar keenam pada tahun 2016. Nilai ekspor kertas A4 Indonesia ke Australia mencapai USD 34,34 Juta pada tahun 2016, namun mulai mengalami penurunan sejak pengenaan BMAD tahun 2017.

Ekspor kertas A4 Indonesia ke Australia pada periode sebelum dan setelah pengenaan BMAD terlihat mengalami penurunan signifikan. Pada periode pengamatan 2015 hingga 2022, ekspor kertas Indonesia mengalami penurunan nilai tahunan rata-rata sebesar 21,17%. Perubahan nilai ekspor



kertas A4 Indonesia ke Australia pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan 2015 juga menurun sangat tajam, yaitu mencapai 70,56%. Data BPS juga menunjukkan bahwa pada tahun 2022 posisi Australia sebagai negara tujuan ekspor Indonesia turun dan berada di urutan ke-28 dengan nilai ekspor sebesar USD 8,20 Juta.

Sebaliknya, nilai ekspor kertas A4 Indonesia ke negara-negara selain Australia (atau disebut “negara lainnya”) dan juga ke dunia mencatatkan peningkatan tahunan rata-rata sebesar 1,88% dan 1,50% pada periode 2015–2022. Nilai ekspor kertas

A4 Indonesia ke negara lainnya dan ke dunia juga mengalami pertumbuhan sebesar 20,98% hingga 23,52% pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2015. Dengan demikian, ekspor kertas A4 Indonesia ke Australia jelas sangat terpengaruh oleh pengenaan BMAD. Terlebih lagi pada tahun 2022 pengenaan BMAD oleh Australia terhadap kertas A4 asal Indonesia cukup besar, yakni 25,50% hingga 59,70% Kenaikan BMAD tersebut meningkat drastis dari pengenaan sebelumnya yang hanya sebesar 12,60% hingga 45,10% pada tahun 2017.

Tabel 1. Nilai Ekspor Kertas Indonesia ke Australia dan Dunia, 2015–2022

(Satuan dalam USD Juta)

Negara	2015*	2016*	2017	2018	2019
Australia	27,86	34,34	19,72	11,57	15,42
Lainnya	1.006,88	1.003,73	1.026,24	1.335,85	1.376,69
Dunia	1.034,73	1.038,07	1.045,97	1.347,42	1.392,11

Negara	2020	2021	2022	Tren 2015–2022 (%)	Perubahan 2022/2015 (%)
Australia	7,85	5,74	8,20	(21,17)	(70,56)
Lainnya	1.000,87	1.031,06	1.243,66	1,88	23,52
Dunia	1.008,72	1.036,80	1.251,86	1,50	20,98

Ket: \* Periode sebelum pengenaan BMAD  
Sumber: BPS (2023), diolah

BMAD untuk Produk Kertas A4

Otoritas anti dumping Australia atau Australian Anti-Dumping Commission (AADC) pada 3 Februari 2023 mengumumkan inisiasi *Exemption Inquiry* BMAD untuk produk A4 *Copy Paper* (EX0098) melalui *Anti-Dumping Notice* (ADN) No. 2023/005 yang berasal dari beberapa negara pengekspor. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor kertas A4 ke Australia, sehingga Indonesia termasuk dalam penyelidikan EX0098. Penyelidikan EX0098 diinisiasi atas permohonan dari Jackaroo Pty Ltd yang menyampaikan bahwa Paper Australia Pty Ltd atau Opal Australian Paper (Opal) tidak dapat menjual kertas A4 kepada konsumen di Australia karena menemui kendala

dalam memproduksi, utamanya karena kesulitan menemukan pemasok bahan baku selain dari pemasok utamanya (VicForests).

Inisiasi *exemption inquiry* BMAD dapat diajukan oleh pemohon apabila terdapat kondisi yang memenuhi ketentuan regulasi domestik Australia, yakni *Section 8(7)(a)* dan *10(8) Customs Tariff (Anti-Dumping) Act 1975* yang menyatakan bahwa pengenaan BMAD dan bea masuk imbalan (baik interim ataupun definitif) dapat dibebaskan apabila Industri Dalam Negeri (IDN) tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumennya dalam hal menjual barang sejenis atau barang yang bersaing langsung dengan barang yang

dikenakan berbagai jenis bea masuk tersebut. AADC selanjutnya akan melakukan penyelidikan *exemption inquiry* dan merekomendasikan temuan dari penyelidikan dimaksud kepada Menteri Industri dan Sains Australia untuk membebaskan atau tidak produk yang diselidiki tersebut. AADC dalam ADN No. 2023/005 menyatakan bahwa pihak yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam penyelidikan dengan menyampaikan submisi hingga 24 Februari 2023.

Berdasarkan aturan World Trade Organization (WTO), untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh barang impor, maka WTO mengizinkan anggotanya untuk menerapkan instrumen *trade remedies* atau *trade defence measures* berupa *Safeguard* (SG) untuk mengatasi lonjakan impor, Anti Dumping (AD) untuk mengatasi impor barang yang mengandung dumping, dan Anti Subsidi (AS) untuk mengatasi impor barang yang mengandung subsidi. Dalam melakukan penyelidikan tersebut, tentu otoritas anti dumping terkait memerlukan waktu untuk mengkaji submisi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dalam penyelidikan diharapkan dapat menyampaikan bukti berupa data dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan.

## Langkah Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang berkepentingan dalam penyelidikan dimaksud (sesuai Pasal 6.11 *Anti-Dumping Agreement*) tentu akan melakukan pembelaan. Pembelaan terhadap akses pasar ekspor adalah salah satu prioritas kebijakan pemerintah dalam menjaga kinerja ekspor. Hal ini juga menjadi penting karena perusahaan eksportir/produsen yang menjadi subjek pengenaan *trade defence measures* dihadapkan pada situasi sulit yang memerlukan penyusunan ulang strategi penjualan, penentuan ulang pasar tujuan penjualan, atau bahkan penetapan keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan operasional perusahaan setelah mempertimbangkan penurunan pada berbagai indikator kinerja perusahaan (Chandra & Long, 2013).

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah mengambil langkah strategis untuk membela produk kertas A4 asal Indonesia. Pada 17 Februari 2023 Kementerian Perdagangan telah mengirimkan surat partisipasi untuk menjadi pihak yang berkepentingan, sekaligus menyampaikan submisi pembelaan Pemerintah Indonesia. Dalam submisi yang disampaikan tersebut, Kementerian Perdagangan antara lain menyampaikan perlunya AADC untuk mengkaji kembali: (i) *Standing petitioner* Industri Dalam Negeri Australia, (ii) Implementasi BMAD untuk kertas A4 asal Indonesia, dan (iii) Cakupan spesifikasi barang yang diselidiki dalam penyelidikan ini.

Ke depan Kementerian Perdagangan akan terus memonitor perkembangan dan berpartisipasi aktif dalam penyelidikan EX0098, mengingat pengenaan BMAD telah memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap kinerja ekspor kertas A4 Indonesia ke Australia serta menjadi hambatan bagi akses pasar ekspor Indonesia ke negara mitra dagang. Selain upaya pemerintah, kerja sama dengan *stakeholders* terkait seperti eksportir asal Indonesia yang terlibat dalam penyelidikan dan peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta perwakilan perdagangan di Australia tentu sangat diperlukan, utamanya dalam hal penyampaian bukti dan informasi yang relevan dalam penyelidikan ini.

## Biodata Penulis



Resti Maheralia, S.E., M.S.E.



Analisis Perdagangan Ahli Pertama

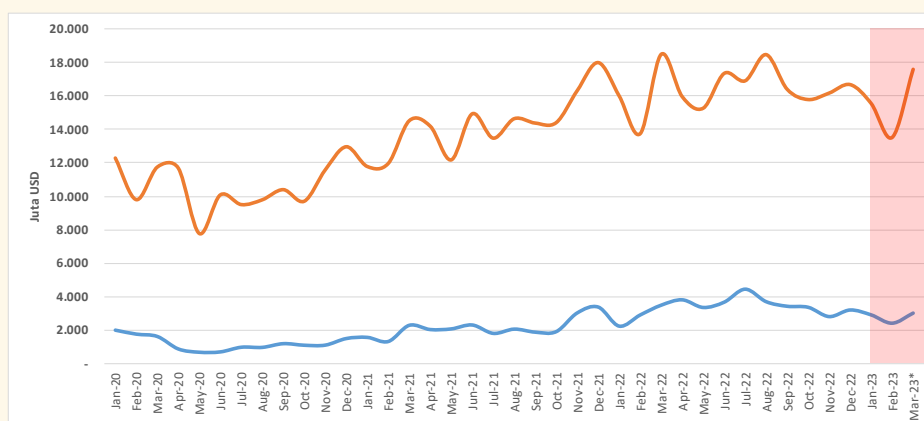


resti.maheralia@gmail.com



# Impor Indonesia Triwulan I 2023 Turun

Impor Indonesia periode Triwulan I-2023 turun, terutama pada Januari-Februari 2023. Bahkan, nilai impor pada Februari 2023 merupakan yang terendah sejak tahun 2022. Namun demikian, memasuki Maret 2023 nilai impor kembali meningkat, baik pada sektor migas maupun non migas, meskipun kenaikan ini belum mampu mendorong kinerja impor secara kumulatif pada Triwulan I-2023. Impor didominasi oleh bahan baku / bahan penolong. Penurunan impor di awal tahun umum terjadi, biasanya karena usai libur panjang akhir tahun dan menghabiskan stok.



**Gambar 1. Perkembangan Nilai Impor Migas dan Non Migas, 2020 – 2023\***

Sumber: BPS (2023), diolah

Total impor menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 29,33% di bulan Maret 2023 dibandingkan bulan sebelumnya (MoM). Kenaikan impor terjadi pada seluruh sektor, baik migas maupun non migas. Kenaikan impor pada sektor migas sebesar 25,28% (MoM) dan sektor non migas naik lebih tinggi sebesar 30,05% (MoM). Adapun nilai total impor sebesar USD 20,59 Miliar terdiri atas impor migas sebesar USD 3,02 Miliar dan impor non migas sebesar USD 17,57 Miliar. Kenaikan impor pada Maret 2023 dipicu oleh meningkatnya impor dari seluruh golongan barang. Peningkatan impor pada Maret 2023 juga merupakan tanggapan atas permintaan domestik yang tinggi pada momen Ramadhan

dan Idul Fitri. Hal ini tercermin dari menguatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Maret 2023 sebesar 123,3 yang lebih tinggi dari Februari 2023 (122,4). Selain itu, peningkatan impor juga sejalan dengan kenaikan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur Indonesia dari posisi 51,2 pada bulan Februari 2023 ke level 51,9 pada bulan Maret 2023, di mana industri manufaktur di dalam negeri mengalami ekspansi sebagai dampak peningkatan permintaan tersebut.

Walaupun impor meningkat cukup tinggi pada bulan Maret 2023, namun secara kumulatif Januari - Maret 2023, impor justru mengalami



penurunan tipis sebesar 3,28% dibandingkan Januari – Maret 2022 (YoY). Penurunan dialami oleh impor sektor migas yang turun sebesar 3,44% (YoY) dan impor non migas turun sebesar 3,25% (YoY). Dengan demikian, total impor pada periode tersebut mencapai USD 54,95 Miliar, terdiri atas

impor migas sebesar USD 8,33 Miliar dan impor non migas sebesar USD 46,62 Miliar. Penurunan impor secara kumulatif terutama berasal dari menurunnya impor Bahan Baku/Penolong. Sementara, impor Barang Modal dan Barang Konsumsi cenderung naik pada periode tersebut.

Tabel 1. Nilai Impor Indonesia periode Januari – Maret 2023

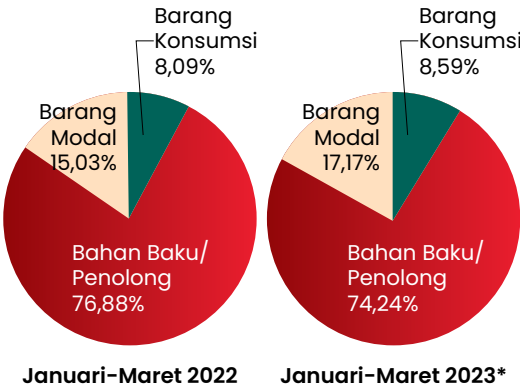
Rincian Impor	NILAI: USD JUTA		Pertumbuhan (%)
	Januari–Maret 2022	Januari–Maret 2023*	
Total Impor Indonesia	56.812,00	54.950,00	-3,28
Migas	8.623,70	8.327,30	-3,44
Minyak Mentah	1.810,50	2.309,20	27,54
Hasil Minyak	5.511,00	4.930,50	-10,53
Gas	1.302,20	1.087,60	-16,48
Non Migas	48.188,30	46.622,70	-3,25

Sumber: BPS (2023), diolah Puska EIPP

Impor Non Migas Menurut Penggunaan Barang

Impor berdasarkan jenis penggunaan barang pada periode Januari – Maret 2023 masih didominasi oleh Bahan Baku / Penolong dengan pangsa 74,24%, disusul impor Barang Modal dan Barang Konsumsi yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 17,17% dan 8,59%.

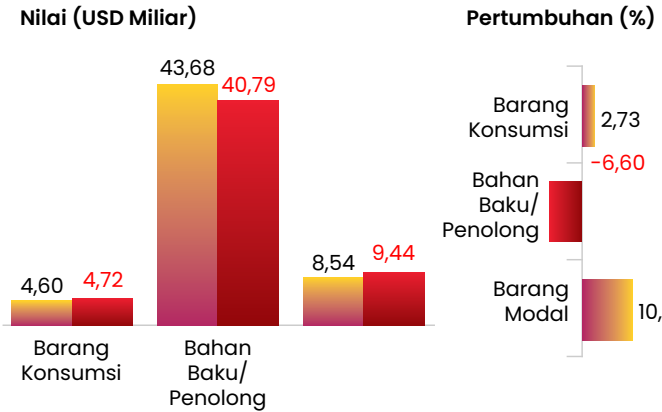
impor. Di sisi lain, impor Barang Modal dan Barang Konsumsi justru meningkat masing-masing sebesar 10,50% (YoY) dan 2,73% (YoY) sehingga nilai impor Barang Modal dan Barang Konsumsi masing-masing mencapai USD 9,44 Miliar dan USD 4,72 Miliar pada periode Januari – Maret 2023.



Gambar 2. Pangsa Impor Menurut Jenis Penggunaan Barang

Sumber: BPS (2023), diolah Puska EIPP

Dibandingkan dengan periode Januari – Maret 2022, nilai impor Bahan Baku / Penolong sebesar USD 40,79 Miliar atau turun 6,60% (YoY). Mengingat pangsa impor Bahan Baku/Penolong merupakan yang terbesar, maka penurunan pada golongan barang tersebut mendorong penurunan total



Gambar 3. Nilai dan Pertumbuhan Impor Menurut Jenis Penggunaan Barang

Sumber: BPS (2023), diolah Puska EIPP

Impor Non Migas Menurut Negara Asal

Sebagian besar impor non migas masih didominasi oleh RRT dengan pangsa 32,26% terhadap total impor pada periode Triwulan I 2023. Meskipun demikian, nilai impor non migas dari RRT pada periode Januari – Maret 2023 sebesar USD 15,04 Miliar turun 4,75% dibanding periode yang sama

tahun lalu. Selain RRT, impor non migas Indonesia pada Triwulan I 2023 juga banyak dipasok dari Jepang dengan pangsa 9,12% dan Thailand dengan pangsa 6,26%. Impor non migas dari Jepang pada

periode tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,23% (YoY), namun impor non migas dari Thailand menurun sebesar 7,82% (YoY).

**Tabel 2. Negara Utama Impor Non Migas, Januari – Maret 2023**

No	Negara Asal	USD JUTA		Perubahan (USD Juta)	Perubahan (%)
		Jan-Mar 2022	Jan-Mar 2023*	YoY	YoY
1	RRT	15.789,80	15.040,13	-749,67	-4,75
2	JEPANG	4.243,59	4.253,22	9,62	0,23
3	THAILAND	3.165,22	2.917,67	-247,56	-7,82
4	KOREA SELATAN	2.570,76	2.577,84	7,08	0,28
5	AMERIKA SERIKAT	1.992,06	2.233,78	311,72	16,22
6	AUSTRALIA	1.907,44	1.948,46	41,02	2,15
7	SINGAPURA	2.248,10	1.898,15	-349,94	-15,57
8	INDIA	2.037,23	1.697,38	-339,85	-16,68
9	MALAYSIA	1.593,81	1.480,31	-113,50	-7,12
10	VIETNAM	1.266,51	1.283,60	17,09	1,35
11	JERMAN	852,23	1.168,59	316,35	37,12
12	TAIWAN	1.234,27	1.015,31	-218,96	-17,74
13	BRAZIL	864,47	806,46	-58,01	-6,71
14	KANADA	620,62	678,84	58,22	9,38
15	ARGENTINA	602,24	605,22	2,98	0,50
16	HONGKONG	724,15	572,09	-152,06	-21,00
17	PERANCIS	317,11	464,14	147,03	46,37
18	FEDERASI RUSIA	604,16	449,53	-154,63	-25,59
19	FILIPINA	348,53	413,92	65,39	18,76
20	ITALIA	352,34	393,46	41,12	11,67

Sumber: BPS (April 2023), diolah Puska EIPP

Kenaikan impor non migas tertinggi diantaranya berasal dari Perancis, Jerman, Filipina, Amerika Serikat, dan Italia. Pada periode Januari-Maret 2023, impor non migas dari Perancis meningkat tajam sebesar 46,37% (YoY) menjadi USD 0,46 Miliar. Pada periode yang sama, impor dari Jerman juga mengalami kenaikan sebesar 37,12% (YoY) menjadi USD 1,17 Miliar. Adapun kenaikan impor dari Filipina tercatat 18,76% (YoY) menjadi USD 0,41 Miliar, Peningkatan impor dari Amerika Serikat dan Italia masing-masing sebesar 16,22% (YoY) dan 11,67% (YoY).

Di sisi lain, impor non migas dari beberapa negara seperti Federasi Rusia, Hongkong, Taiwan, India, dan Singapura justru mengalami penurunan. Pada periode Januari – Maret 2023, nilai impor dari

Federasi Rusia tercatat sebesar USD 0,45 Miliar, menurun sebesar 25,59% (YoY). Impor non migas dari Hongkong juga menurun cukup dalam sebesar 21,00% (YoY), diikuti oleh impor asal Taiwan yang turun sebesar 17,74% (YoY), India turun 16,68% (YoY), serta Singapura turun 15,57% (YoY).

## Impor Non Migas Menurut Kelompok Barang

Berdasarkan jenis barang, impor non migas Indonesia pada periode Januari – Maret 2023 masih ditopang oleh impor Mesin dan Peralatan Mekanis (HS 84) dengan pangsa 13,48% atau sebesar USD 7,40 Miliar serta Mesin dan Perlengkapan Elektrik (HS 85) dengan pangsa

12,51% atau sebesar USD 6,87 Miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, impor Mesin dan Peralatan Mekanis turun 2,51% (YoY), namun Mesin dan Perlengkapan Elektrik naik sebesar 7,99% (YoY).

**Tabel 3. Perkembangan Nilai Impor Indonesia menurut HS 2 Digit, Januari - Maret 2023**

HS	URAIAN	Januari-Maret 2023*				
		USD Juta	Perubahan Nilai YoY (%)	Kontribusi (%)	Ribu Ton	Perubahan Volume YoY (%)
	<b>TOTAL IMPOR</b>	<b>54.950,03</b>	<b>-3,28</b>	<b>100,00</b>	<b>45.992,85</b>	<b>4,39</b>
<b>NM</b>	<b>TOTAL NON MIGAS</b>	<b>46.622,73</b>	<b>-3,25</b>	<b>84,85</b>	<b>34.069,25</b>	<b>2,47</b>
84	Mesin dan peralatan mekanis	7.405,1	-2,51	13,48	955,00	-2,01
85	Mesin dan perlengkapan elektrik	6.875,3	7,99	12,51	333,23	-5,06
72	Besi dan baja	2.955,5	-20,75	5,38	3.575,03	2,55
87	Kendaraan dan bagiannya	2.753,0	22,56	5,01	334,81	15,19
39	Plastik dan barang dari plastik	2.324,4	-23,27	4,23	1.294,33	-9,07
29	Bahan kimia organik	1.750,4	-17,81	3,19	1.355,52	0,26
10	Sereal	1.364,2	16,50	2,48	3.354,18	6,26
73	Barang dari besi dan baja	1.225,1	33,16	2,23	528,60	59,85
27	Bahan bakar mineral	1.194,4	57,25	2,17	3.605,21	51,18
23	Ampas/sisa industri makanan	1.053,9	7,26	1,92	1.734,85	-0,95
17	Gula dan kembang gula	930,0	-18,27	1,69	1.731,52	-21,77
90	Perangkat optik, fotografi, sinematografi, med	867,0	8,33	1,58	27,91	7,03
38	Berbagai produk kimia	847,1	-17,95	1,54	450,34	-7,19
31	Pupuk	697,6	-16,61	1,27	1.240,07	-29,05
28	Bahan kimia anorganik	640,7	-8,47	1,17	1.176,86	15,11
	<b>SUBTOTAL 15 KOMODITAS UTAMA NON-MIGAS LAINNYA</b>	<b>32.883,78</b>	<b>-1,66</b>	<b>59,84</b>	<b>21.697,46</b>	<b>3,34</b>
	<b>TOTAL MIGAS</b>	<b>8.327,30</b>	<b>-3,44</b>	<b>15,15</b>	<b>11.923,60</b>	<b>10,29</b>
	Minyak Mentah	2.309,20	27,54	4,20	3.783,10	32,97
	Hasil Minyak	4390,50	-10,53	8,97	6.464,90	2,74
	Gas	1.087,60	-16,48	1,98	1.675,60	0,13

Sumber: BPS (April 2023), diolah Puska EIPP

Beberapa produk dengan peningkatan impor terbesar di antara 15 produk utama impor pada periode Januari - Maret 2023 yaitu Bahan Bakar Mineral (HS 27) naik 57,28%, Barang dari Besi dan Baja (HS 73) naik 33,16%, Kendaraan dan Bagiannya (HS 87) naik 22,56%, dan Sereal (HS 10) naik 16,50%. Sementara penurunan impor tertinggi terjadi pada kelompok Plastik dan Barang dari Plastik (HS 39) yang turun 23,27%, Besi dan Baja (HS 72) turun 20,75%, Gula dan Kembang Gula (HS 17) yang turun 18,27%, dan Berbagai Produk Kimia (HS 38) turun 17,95%.

### Biodata Penulis



**Fitria Faradila, S.E., M.Sc.**  
 Analis Perdagangan Ahli Pertama  
 faradilafitria@gmail.com

# Aflatoxin Pada Ekspor Pala ke Uni Eropa: Upaya Mencari Solusi



Terkendalanya ekspor pala (HS 090811 dan HS 090812) Indonesia ke Uni Eropa (UE) mayoritas terkait dengan munculnya cemaran berupa *aflatoxin*. Berdasarkan data yang bersumber dari European Union *Rapid Alert System for Food and Feed* (EU-RASFF), sejak Januari 2020 hingga Maret 2023 terdapat 33 notifikasi kepada Indonesia dengan rincian 16 kasus temuan *aflatoxin*, 13 temuan *ochratoxin*, 1 temuan *aflatoxin* sekaligus *ochratoxin*, 1 kasus terkait *visible mold*, dan 2 kasus karena tidak adanya sertifikat kesehatan/*health certificate*. Belanda adalah negara yang paling sering melaporkan temuan permasalahan pada pala impor asal Indonesia. Hambatan ekspor pala Indonesia ke UE secara ringkas ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hambatan Ekspor Pala asal Indonesia ke UE

Negara Yang Menotifikasi	2020			2021			2022			2023 (Jan – Mar)		Total
	AO	O	HC	A	O	HC	A	O	VM	A	O	
Belgia										1		1
Denmark				1								1
Jerman				1			2			1		4
Hungaria								1				1
Italia				1								1
Latvia			1									1
Belanda	1	1		4	4		3	3	1	1	4	22
Spanyol						1	1					2
Total	1	1	1	7	4	1	6	4	1	3	4	33

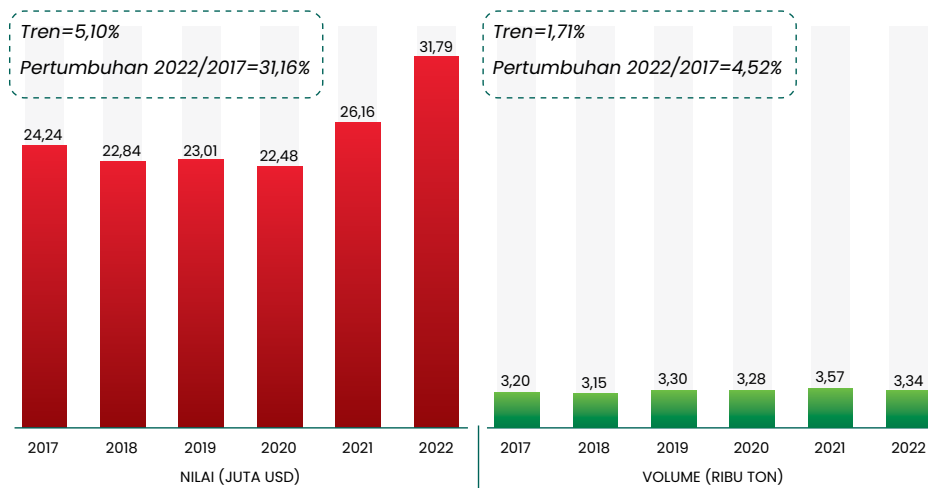
Keterangan: A = *aflatoxin*, O = *ochratoxin*, AO = *aflatoxin & ochratoxin*, VM = *visible mold*, dan HC = sertifikat kesehatan

Sumber: EU-RASFF (2023)

## Ekspor Pala Indonesia ke UE

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pala Indonesia ke UE selama periode 2017–2022 meningkat rata-rata sebesar 5,10% per tahun atau sebesar 31,16% pada 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2017. Volume ekspor meningkat rata-rata sebesar 1,71% per tahun, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,52% pada 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa produk pala Indonesia masih diminati oleh negara-negara anggota UE, meskipun temuan cemaran *aflatoxin* cenderung berulang. Kinerja ekspor pala Indonesia ke UE ditampilkan pada Gambar 1.





**Gambar 1. Ekspor Pala Indonesia ke UE**

Sumber: BPS (2023)


Berdasarkan data pada Tabel 2, UE merupakan negara tujuan ekspor utama pala Indonesia. Namun jika dilihat per negara, maka Belanda, Jerman, dan Italia menempati peringkat ketiga, keenam, dan ketujuh dari sepuluh besar negara tujuan utama pala Indonesia. Meskipun Belanda dan Jerman tergolong sering dalam

menotifikasikan temuan *afatoxin* pada pala asal Indonesia, namun pangsa ekspor ke kedua negara tersebut cukup tinggi pada tahun 2022, yakni 6,88% dan 2,61% dari total ekspor pala Indonesia. Hal ini menandakan bahwa pala asal Indonesia merupakan komoditas penting di kedua negara dimaksud.

**Tabel 2. Ekspor Pala Indonesia**

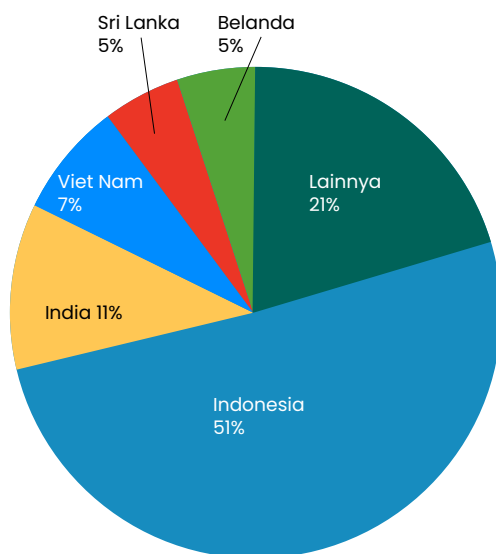
(dalam: USD)

Negara Tujuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rep, Rakyat Tiongkok	270,550	1,093,480	16,083,213	28,885,110	44,930,173	30,788,725
Vietnam	19,464,484	24,378,002	14,093,843	15,895,616	16,857,427	19,893,293
Belanda	7,474,764	5,651,082	8,802,702	7,159,980	10,578,290	11,824,887
Jepang	5,462,300	4,603,662	5,867,955	5,346,778	5,592,129	8,601,688
Amerika Serikat	8,773,848	7,006,791	7,332,935	6,893,960	8,685,019	8,586,889
Jerman	7,275,352	8,743,252	5,971,702	7,025,237	6,746,203	8,048,830
Italia	3,787,133	3,586,336	3,618,287	3,492,678	4,441,241	5,919,762
India	1,462,840	1,947,853	2,255,005	1,995,575	3,035,684	3,254,790
Brasil	513,138	1,064,731	1,106,266	1,250,511	1,146,941	2,721,877
Uni Emirat Arab	2,150,169	1,214,750	2,104,123	771,730	577,649	2,214,845
Total Uni Eropa	<b>24,238,607</b>	<b>22,835,004</b>	<b>23,008,318</b>	<b>22,481,611</b>	<b>26,161,806</b>	<b>31,790,685</b>
Negara Lainnya	<b>17,053,272</b>	<b>14,130,757</b>	<b>18,682,192</b>	<b>17,382,387</b>	<b>22,145,455</b>	<b>22,895,044</b>
Total	<b>73,687,849</b>	<b>73,420,695</b>	<b>85,918,224</b>	<b>96,099,560</b>	<b>124,736,211</b>	<b>124,750,629</b>

Keterangan :  = negara anggota UE

Sumber: BPS (2023), diolah

Posisi Indonesia sebagai eksportir pala terbesar di dunia memerlukan perhatian di tiap rantai pasoknya agar kadar air (kurang dari 10%) dan kelembaban udara (kurang dari 65%) tetap terjaga untuk mencegah timbulnya *aflatoxin* hingga produk sampai di negara pengimpor (Supriadi, 2017). Pada tahun 2021, Indonesia berkontribusi paling besar terhadap ekspor pala dunia, yaitu sebesar 51%, disusul India (11%), Vietnam (7%), Sri Lanka (5%), dan Belanda (5%) (Gambar 2).



**Gambar 2. Eksportir Pala Dunia**

Sumber: Trademap (2023), diolah

## Isu Cemaran *Aflatoxin*

*Aflatoxin* merupakan kontaminan yang dapat muncul pada pala, bersumber dari pertumbuhan organisme yang tidak diharapkan yaitu cendawan, serta dapat membahayakan kesehatan mahluk hidup yang mengkonsumsi (Dharmaputra, et, al,, 2015). UE mengatur batas maksimum cemaran *aflatoxin* pada produk pala impor di dalam regulasi No. 165/2010, dimana *aflatoxin* B1 dibatasi 5 µg/kg (ppb) dan *aflatoxin* total (atau penjumlahan *aflatoxin* B1, G1, B2, dan G2) dibatasi 10 µg/kg (ppb). Pada 2016, UE menerbitkan regulasi No. 2016/24 yang mengatur peningkatan pengendalian, antara lain terhadap impor pala dari Indonesia dengan ketentuan mewajibkan pala yang diekspor ke UE agar disertai sertifikat kesehatan yang dilengkapi oleh uji analitik kandungan *aflatoxin*. Regulasi No. 2016/24 juga mengatur frekuensi pemeriksaan fisik dan identitas dengan sampel sebesar 20%

terhadap total impor pala Indonesia. Hal itu berarti dari seluruh produk pala asal Indonesia yang diimpor oleh UE pada periode tertentu akan dilakukan pemeriksaan dengan pengambilan sampel sebanyak 20% untuk dilakukan pengecekan *aflatoxin*. Kemudian, sejak April 2022 UE meningkatkan frekuensi pemeriksaan terhadap produk pala asal Indonesia dengan sampel menjadi 30%.

Ketentuan batas cemaran *aflatoxin* oleh UE dalam konteks kebijakan bukan tarif digolongkan ke dalam kelompok *measure sanitary* dan *phytosanitary measures* yang diistilahkan sebagai "SPS". Annex A.3 dalam SPS Agreement dari World Trade Organization (WTO) antara lain menunjuk Codex Alimentarius Commission sebagai instansi yang berwenang untuk menetapkan standar, panduan, dan rekomendasi untuk keamanan pangan. Namun demikian, Codex Alimentarius Commission belum menentukan batas maksimum cemaran *aflatoxin* pada produk pala, sehingga UE dapat menetapkan SPS measures yang dipertimbangkan untuk memproteksi keselamatan manusia, hewan, atau tumbuhan dengan syarat didukung oleh bukti ilmiah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2.2 SPS Agreement. Implementasi SPS measures dapat berimplikasi pada penyortiran produk-produk asal negara lain yang berpotensi tidak aman terhadap keselamatan mahluk hidup dan habitatnya di negara pengimpor (Ghodsi & Stehrer, 2020). Oleh karena itu, akses pasar ekspor Indonesia ke UE dapat menjadi semakin terhambat apabila UE terus-menerus menemukan permasalahan dan menerbitkan notifikasi terhadap produk pala asal Indonesia.

Peningkatan *aflatoxin* marak terjadi di negara yang memiliki dua musim karena memiliki tingkat kelembaban dan curah hujan yang relatif masif, sehingga penting untuk mempertahankan kadar air dan kelembaban yang rendah setelah produk dipanen (Nagur, et, al,, 2014). Namun demikian, sebelum produk dipanen pun juga diperlukan penanganan yang baik. Rangkaian penanganan terhadap pala yang sesuai dengan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Manufacturing Practices* (GMP) untuk pala adalah

sebagai berikut: (i) Pada fase sebelum panen, petani harus memilih waktu tanam yang tepat, menggemburkan tanah dengan menggunakan alat tertentu, membangun sistem pengairan yang baik, pemupukan yang sesuai, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta menyingi gulma; (ii) Pala dipanen saat masih berada di pohon dan pala yang dipanen tidak boleh bersentuhan dengan tanah agar tidak terinfeksi oleh organisme yang merugikan; (iii) Pala yang dipanen oleh petani tidak boleh ditunda untuk dijemur agar kadar air pada pala dapat dipertahankan lebih rendah dari 10%, selanjutnya pengumpul juga melakukan penjemuran ulang dan pala yang telah dijemur harus diposisikan pada ruangan dengan suhu 10 derajat Celcius, kelembaban udara kurang dari 65%, dan bebas dari hewan pengganggu; dan (iv) Eksportir yang bermaksud mengirimkan pala ke negara mitra harus melakukan penyortiran pada pala yang akan dikirim dan selanjutnya mengaplikasikan penggunaan kemasan yang tepat dimana umumnya adalah karung goni (Ayalew & Kimanya, 2017; Supriadi, 2017).

Untuk mencegah *aflatoxin* muncul saat pengiriman, diperlukan pemangkasan waktu pengiriman ke negara mitra agar pala yang diekspor tidak terlalu lama terpapar udara lembab dan hujan. Salah satu cara yang dapat ditempuh misalnya dengan memilih perusahaan jasa pengangkutan yang langsung mengirimkan barang ke negara mitra tanpa melalui proses singgah di wilayah tertentu atau disebut sebagai *direct call export* (Notteboom, 2006). Melalui upaya perbaikan (*corrective action*) yang tepat maka dapat dihasilkan pala dengan tingkat cemaran *aflatoxin* yang rendah dan tidak melanggar ketentuan importasi UE sehingga pada akhirnya dapat menurunkan notifikasi dari EU-RASFF.

Opsi lainnya yang dapat ditempuh adalah dengan menjajaki kerja sama bilateral dengan UE berupa implementasi *Mutual Recognition Agreement* (MRA). Indonesia harus memasukkan isu MRA dalam proses perundingan Indonesia – UE *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) yang diyakini dapat memberi banyak manfaat, antara lain: (i) Memperlancar kegiatan

ekspor-impor; (ii) Meningkatnya pasokan barang dengan kualitas yang sesuai ekspektasi konsumen; (iii) Penilaian kesesuaian di negara pengekspor diakui di negara pengimpor, sehingga eksportir cukup mengeluarkan satu kali biaya pengujian; (iv) Memberi kemudahan dalam membidik target pasar karena eksportir dapat menyesuaikan spesifikasi produk yang diekspor dengan ketentuan yang diterapkan oleh negara pengimpor; dan (v) Mengeliminasi hambatan nontarif (Rizqi, 2010; ASEAN Consultative Committee on Standards & Quality, 2014; Jang, 2018).

MRA yang disusun ini dapat mencakup sektor GAP dan GMP. Implementasi GAP dan GMP yang efektif dan efisien dapat menjamin ketersediaan pangan yang tidak menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan (Abia, *et, al.,* 2021). Berangkat dari hal-hal tersebut maka diperlukan: (i) Diseminasi informasi yang intensif kepada petani, pengumpul, dan eksportir terkait pencegahan *aflatoxin* pada pala secara optimal; (ii) Peningkatan riset dan pengembangan lebih lanjut untuk memitigasi tumbuhnya *aflatoxin* saat tiba di negara pengimpor; dan (iii) Penerapan GAP dan GMP di setiap rantai pasok secara konsisten dalam penanganan produk pala yang akan diekspor.

## Biodata Penulis



Resti Maheralia, S.E., M.S.E.



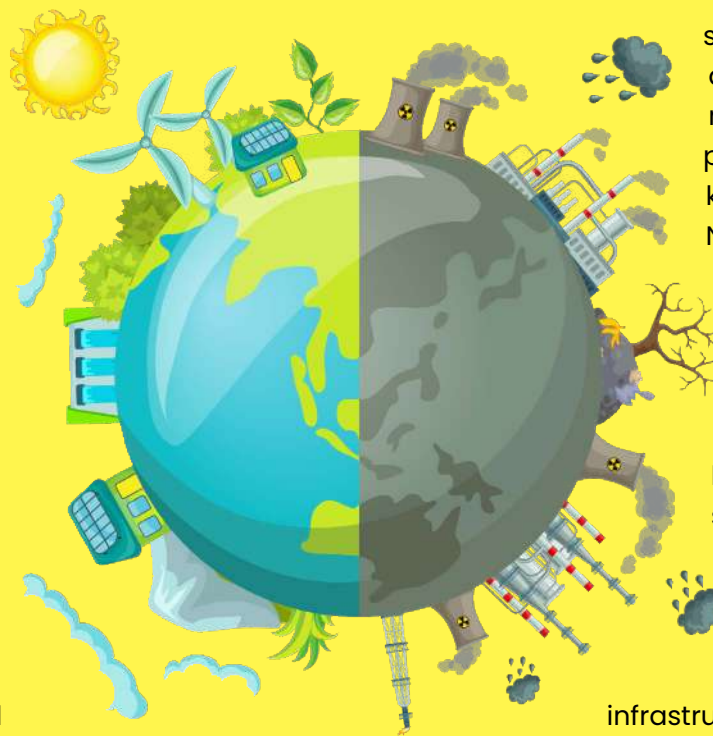
Analisis Perdagangan Ahli Pertama



resti.maheralia@gmail.com

# Transisi Energi dan Peningkatan Permintaan Komoditas Logam serta Posisi Indonesia Sebagai Produsen Nikel Dunia

Upaya global untuk beralih ke energi bersih terbarukan diprediksi menjadi faktor penting yang akan memengaruhi perdagangan komoditas logam ke depannya. Pada akhir November 2021, *United Nations Climate Change Conference (COP26)* menandai momentum pembaharuan komitmen global terhadap pencapaian target *Net-Zero Emission (NZE)* yang bertujuan untuk menjaga agar kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius

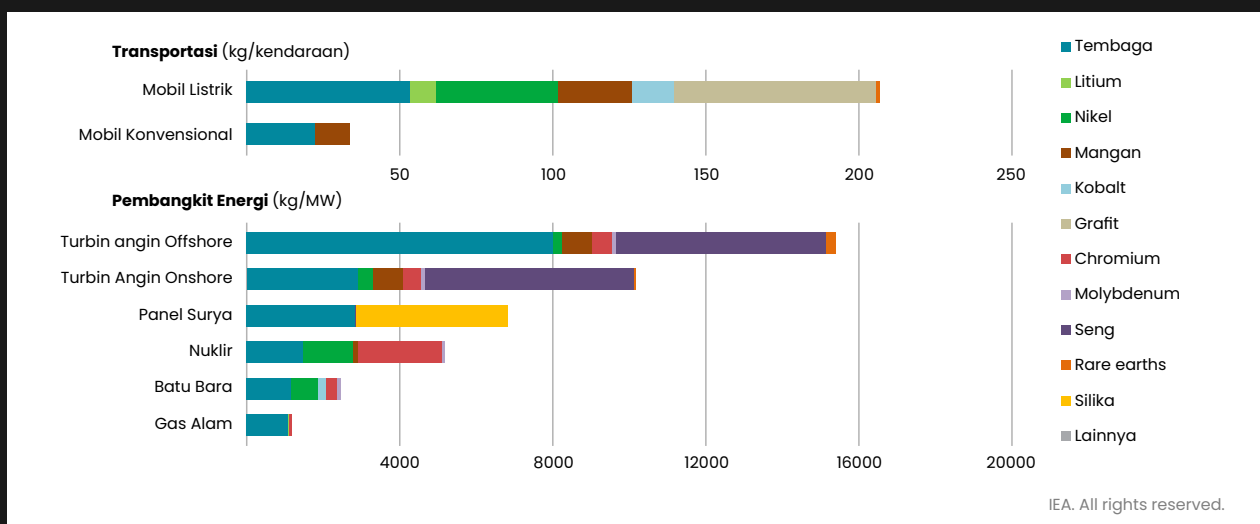


sampai pertengahan abad ini. Sebanyak 74 negara dan lebih dari 600 perusahaan menyatakan komitmen terhadap target NZE (World Resources Institute, 2022). Sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan energi bersih, permintaan terhadap beberapa komoditas logam akan semakin meningkat karena beberapa jenis komoditas logam dibutuhkan untuk pembaharuan infrastruktur teknologi penghasil energi.

## Logam Berperan Penting dalam Transisi Energi Menuju NZE

Transisi menuju *Net Zero Emission (NZE)* dapat dibilang *metal intensive*. Komoditas logam akan menjadi input utama dalam upaya dekarbonisasi dan elektrifikasi ekonomi saat dunia beralih dari bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan seperti listrik tenaga surya, turbin angin, dan kendaraan listrik. Proses ini juga akan melibatkan teknologi baru yang mengkombinasikan berbagai bahan mineral logam untuk mencapai komposisi terbaik dalam menghasilkan energi bersih. Seluruh perubahan dalam rangka mencapai NZE akan menciptakan pergeseran permintaan dalam ekosistem perdagangan komoditas logam.





Keterangan: Kg: kilogram. Besi dan Aluminium tidak termasuk

### Gambar 1. Mineral Logam yang Digunakan Untuk Beberapa Teknologi Energi Terbarukan

Sumber: International Energy Agency (IEA) (Agustus 2021)

Setiap sistem energi membutuhkan input sumber daya yang berbeda. Dalam laporan *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transition* yang diterbitkan oleh International Energy Agency (IEA) tahun 2021, disebutkan bahwa untuk membangun panel surya/*solar photovoltaic* (PV), ladang turbin angin, dan kendaraan listrik/*electric vehicles* (EV) memerlukan lebih banyak logam dibandingkan energi fosil konvensional. Kendaraan listrik memerlukan enam kali lebih banyak input logam dibandingkan mobil biasa, sedangkan ladang turbin angin memerlukan sembilan kali lebih banyak input logam dibandingkan generator yang berbahan bakar gas.

Jenis mineral logam tertentu akan lebih dominan dibutuhkan tergantung teknologi energi terbarukan yang diadopsi. Beberapa komoditas logam dalam jumlah kecil juga memiliki peran cukup penting seperti *lithium* dan *cobalt* untuk baterai EV dan mineral langka (*rare earths*) untuk turbin angin. Namun demikian, terdapat beberapa logam yang dominan dibutuhkan di hampir semua teknologi energi terbarukan, diantaranya tembaga (*cooper*) dan nikel. Selain itu, baja (*steel*) dan aluminium juga memainkan peran penting karena digunakan pada seluruh teknologi untuk membangun infrastruktur tambahan. Selama ini permintaan baja dan aluminium utamanya didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan sektor pembangunan. Dengan kebutuhan akan pembangunan *power generator* baru, kebutuhan baja dan aluminium pun akan ikut meningkat kedepannya.

Tingkat Kepentingan

Tinggi ● Sedang ● Rendah ○

	Tenaga Panas Bumi	Tenaga Air	Nuklir	Bio-energi	Jaringan Tenaga Listrik	Tenaga Surya Terkon-sentrasi	Hidrogen	Tenaga Angin	Panel Surya	Kendaraan Listrik
Baja	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tembaga	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●
Alumunium	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●
Nikel	●	○	●	○	○	●	●	●	●	●
Seng	○	●	○	●	○	●	○	●	●	○
Dysprosium	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●
Neodymium	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●
Praseodymium	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●
Silikon	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Terbium	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●
Kobalt	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●
Grafit	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●
Mangan	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●
Perak	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Kadmium	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Galium	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Iridium	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
Litium	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Platinum	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
Telurium	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Uranium	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○

Gambar 2. Logam Penting dalam Transisi ke Energi Bersih berdasarkan Jenis Teknologi

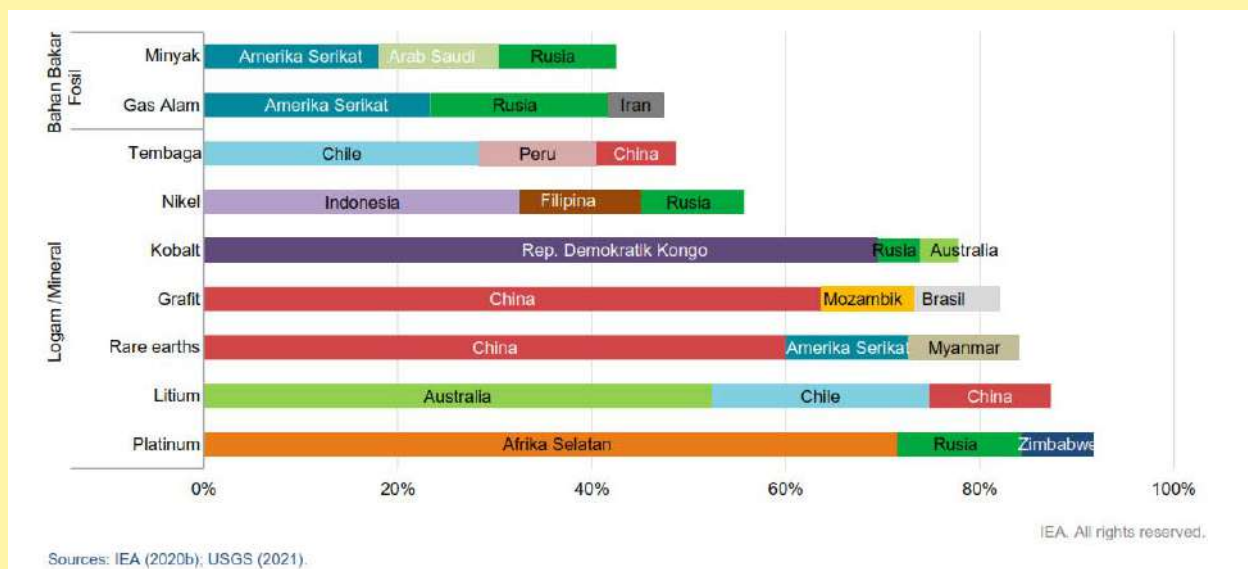
Sumber: McKinsey & Company (2022)

Posisi Indonesia dalam Ekosistem Logam untuk Transisi Energi Terbarukan

Produksi komoditas logam bisa dibilang sangat terkonsentrasi secara geografis. Secara umum, lebih dari 50% produksi mineral logam yang krusial bagi transisi energi dikuasai oleh hanya tiga negara. Sebagai contoh, lebih dari 90% produksi platinum dunia dikuasai oleh Afrika Selatan, Rusia, dan Zimbabwe. Hal ini berbeda dengan produksi minyak, di mana tiga negara utama hanya

menguasai sekitar 43% produksi dunia. Hal lain yang patut diantisipasi yaitu besarnya pengaruh RRT dalam suplai logam. RRT masuk sebagai tiga besar produsen untuk komoditas tembaga (*cooper*), *Graphite*, *Rare Earths*, dan *Lithium*. Perubahan kebijakan pertambangan dan kondisi makro di RRT akan sangat berpengaruh pada stabilitas suplai komoditas tersebut.





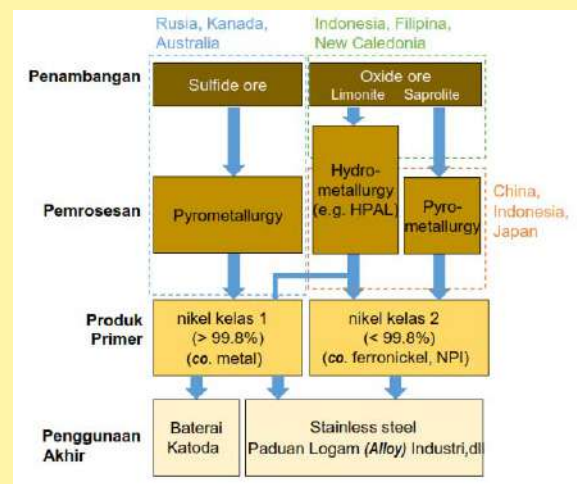
**Gambar 3. Pangsa Tiga Negara Produsen Utama Logam Mineral dan Bahan Bakar Fosil Tahun 2019**

Sumber: International Energy Agency (IEA) (2021)

Indonesia sendiri merupakan produsen penting dalam suplai nikel dunia, dengan *share* produksi mencapai lebih dari 30% (IEA, 2021). Menurut Badan Geologi Amerika Serikat (USGS), produksi nikel Indonesia tahun 2022 mencapai 1,6 juta mt, sedangkan Filipina hanya 330 ribu mt, dan Rusia 220 ribu mt. Indonesia juga diperkirakan masih menyimpan 21 juta metrik ton cadangan nikel.

Nikel dapat diklasifikasikan menjadi dua kelas. Nikel kelas satu merupakan nikel dengan kadar kemurnian lebih dari 99,80% dan nikel kelas dua merupakan nikel dengan kadar kemurnian kurang dari 99,80%. Nikel kelas satu berasal dari *nickel sulfide ore*, sedangkan nikel kelas dua berasal dari *nickel laterite ore*. Sumber *laterite ore* dunia mencapai 178 juta metrik ton, sedangkan *sulfide ore* hanya mencapai 118 juta metrik ton, sehingga produksi nikel kelas dua saat ini lebih tinggi dibandingkan nikel kelas satu (Nickel Institute, 2016). Menurut Statista (2021), sekitar 69% nikel digunakan sebagai bahan baku pada produksi *stainless steel* dan hanya 13% yang digunakan untuk keperluan produksi baterai. Nikel yang digunakan dalam produksi *stainless steel* merupakan nikel kelas dua, sedangkan produksi baterai membutuhkan nikel kelas satu dengan kadar kemurnian yang lebih tinggi. Secara geografis, sumber *nickel sulfide ore* (kelas satu) dan *nickel laterite ore* (kelas dua) terletak di koordinat wilayah yang berbeda. Endapan *sulfide*

*ore* terutama terletak di wilayah Rusia, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan, sedangkan endapan *laterite ore* banyak ditemukan di Indonesia, Filipina, dan Kaledonia Baru.



**Gambar 4. Flowchart Rantai Pasok Nikel**

Sumber: International Energy Agency (IEA) (2021)



Keterangan: Tahun 2022 angka proyeksi

**Gambar 5. Produksi Nikel Indonesia**

Sumber: Kementerian ESDM (2022)

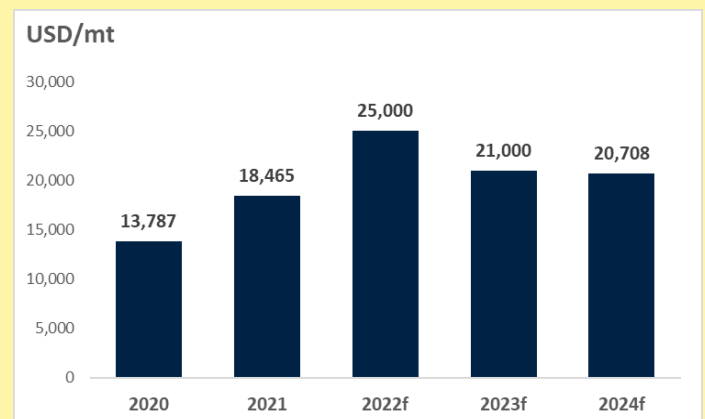
Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa produksi nikel Indonesia didominasi oleh produk turunan dari *laterite ore* (nikel kelas dua) dalam bentuk *ferronikel* dan *Nickel Pig Iron* (NPI). Produksi nikel Indonesia pada tahun 2021 mencapai 2,47 juta ton, di mana sebanyak 2,38 juta ton merupakan *ferronikel* dan NPI, sedangkan produksi *nickel matte* hanya mencapai 83,9 ribu ton. Melihat data tersebut terlihat bahwa produksi nikel Indonesia saat ini sebetulnya lebih cocok ditujukan untuk industri *stainless steel*.

Jika Indonesia ingin memiliki peran penting dalam transisi energi terbarukan, maka Indonesia harus dapat meningkatkan produksi nikel kelas satu-nya. Menurut Huber dalam publikasi *Indonesia's Nickel Industrial Strategy* (CSIS, 2021), *laterite ore* dapat diolah menjadi nikel kelas satu dengan menggunakan teknologi *High-Pressure Acid Leaching* (HPAL). Proses HPAL akan menghasilkan *Mixed Hydrogen Precipitate* (MHP) yang dapat dimurnikan menjadi nikel kelas satu. Dalam hal ini, Indonesia dipandang telah *on track* dengan adanya proyek HPAL di Indonesia.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam produksi Nikel menggunakan HPAL, diantaranya yaitu biaya modal pembangunan proyek HPAL yang umumnya dua kali lipat lebih mahal dibandingkan pembangunan *smelter* konvensional. Selain itu, isu lingkungan juga membayangi pelaksanaan proyek tersebut karena limbah *tailing* yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan *smelter* nikel biasa sehingga memerlukan fasilitas pembuangan yang memadai (Durrant, 2022). Namun demikian, jika proyek HPAL Indonesia dapat sukses terlaksana, hal ini dapat menjadi rujukan bagi proyek HPAL lainnya sehingga kebutuhan akan nikel kelas satu untuk keperluan transisi energi dapat diamankan dari sumber *laterite ore*. Mengingat besarnya pangsa Indonesia dalam produksi nikel dunia, kesuksesan HPAL Indonesia akan menjadi kunci bagi kecukupan pasokan nikel dunia, terutama untuk memenuhi permintaan industri baterai kendaraan listrik kedepannya.

## Proyeksi Permintaan dan Harga Nikel Dunia

Menurut IEA (2021), permintaan mineral di tahun 2040 akan didominasi oleh industri baterai dan kendaraan listrik, sehingga kebutuhan terhadap tiga logam penting yaitu tembaga (*cooper*), *graphite*, dan *nickel* akan meningkat hampir 30 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Di sisi lain, peningkatan produksi nikel membutuhkan proses dan waktu yang panjang mencakup eksplorasi, studi kelayakan, proses perijinan, dan lain-lain yang memakan waktu antara 4-20 tahun. Selain faktor kebutuhan untuk transisi energi, Maybank IBG Research (2023) dalam publikasinya menyatakan bahwa dinamika konsumsi nikel dari industri *stainless steel* juga akan mempengaruhi harga nikel dunia. Kombinasi antara permintaan industri *stainless steel* dan baterai kendaraan listrik akan meningkatkan konsumsi nikel sebesar 9,60% YoY di tahun 2024, sedangkan produksi diprediksi hanya tumbuh sebesar 7,80% YoY.



**Gambar 6. Prediksi Harga Nikel Dunia**

Sumber: World Bank Commodity Market Outlook (2022)

Meskipun demikian, berbagai faktor juga diprediksi akan mengakibatkan turunnya *demand* nikel dunia. Ketidakpastian global yang didorong oleh krisis geopolitik dan isu resesi akan menekan permintaan nikel pada industri *stainless steel*. Risiko lainnya yang berpotensi menurunkan permintaan nikel yaitu pergeseran tren dari baterai *Nickel-Cobalt-Manganese* (NCM) ke *Lithium-Iron-Phosphate* (LFP) di pasar kendaraan listrik RRT, yang akan turut menggeser permintaan sektor industri kendaraan



listrik dari nikel ke *lithium*. Di sisi lain, pasokan nikel terutama dari Indonesia masih tumbuh signifikan. Turunnya *demand* yang dibarengi dengan naiknya suplai nikel secara alami akan melemahkan harga nikel dunia. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga nikel diperkirakan akan menurun 16% pada tahun 2023 (World Bank Commodity Market Outlook, 2022).

Pada akhirnya, nikel diprediksi akan tetap memainkan peran penting dalam transisi energi terkait fungsinya dalam industri *stainless steel* dan baterai listrik. Seluruh *stakeholder* diharapkan dapat memanfaatkan potensi ini sebaik mungkin bagi kesejahteraan bangsa. Namun demikian, konsekuensi dari pembukaan tambang terhadap sosial dan lingkungan juga harus diatasi, diantaranya masalah emisi terkait penambangan dan pengolahan, risiko limbah, pengelolaan air, dan keselamatan pekerja. Memastikan bahwa

kekayaan logam mineral membawa keuntungan nyata bagi masyarakat lokal juga merupakan hal yang penting dalam menjaga keberlanjutan proyek penambangan.

Selain fokus pada investasi untuk penambahan suplai primer dengan pembukaan tambang dan *smelter* baru, pemerintah juga harus mulai menarik investasi proyek *recycling* nikel. Menurut IEA (2021), *recycling* tidak akan serta merta menghilangkan kebutuhan akan suplai primer. Pada tahun 2040, tembaga, litium, nikel dan *cobalt* hasil *recycle* dapat menyumbang 10% suplai untuk memenuhi permintaan logam tersebut. Tambahan suplai dari hasil *recycle* akan mempercepat proses transisi energi kedepannya yang pada akhirnya juga dapat membantu Indonesia untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari naiknya kebutuhan akan logam mineral dalam transisi energi.

### Biodata Penulis



Choirin Nisaa, S.TP



Analisis Perdagangan Ahli Pertama



choirin.nisaa@gmail.com



## Menghindari Risiko *Predatory Pricing* dan Penyalahgunaan *Market Power* di Platform *E-Commerce*

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan *e-commerce* tertinggi dunia. Meskipun penjualan melalui *e-commerce* baru menyumbang sebesar tiga persen dari total penjualan ritel Indonesia, namun dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa yang sebagian besar merupakan penduduk usia muda, serta dengan kebijakan *stay at home* pada masa pandemi dapat mengakibatkan perubahan pola perilaku belanja konsumen yang lebih mengarah pada belanja *online* (JP Morgan, 2020). Dengan pola perubahan yang terjadi khususnya pada masa pandemi yang lalu tersebut, pangsa transaksi berbelanja melalui *e-commerce* di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami akselerasi. Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEa) mencatat transaksi *e-commerce* sebesar Rp 227,8 Triliun sepanjang 2022, naik 22,10% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (Republika, 2023).

Sektor *e-commerce* yang memberikan sumbangan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi digital seiring dengan meningkatnya pengguna internet dunia menjadikan sektor ini banyak dibahas di berbagai forum internasional. Platform *e-commerce* banyak memberikan kesempatan dan kemudahan bagi para penjual (*sellers*) untuk mengembangkan bisnisnya dengan mempermudah para penjual untuk menjangkau pasar yang lebih luas atau pelanggan yang baru. Namun demikian, masih terdapat isu yang perlu menjadi perhatian dalam meningkatnya praktik penjualan melalui *e-commerce*. Salah satu isu yang menjadi

perhatian berbagai negara di dunia termasuk Indonesia adalah mengenai persaingan antar platform *e-commerce* yang banyak melakukan *deep discounting/predatory pricing*. Selain itu, dalam upaya untuk memperlebar pangsa pasar, terdapat risiko penyalahgunaan *market power* oleh platform *e-commerce* yang memberikan tekanan kepada para penjual yang telah tergabung dalam platform *e-commerce*. Praktik-praktik tersebut dikhawatirkan akan menciptakan iklim perdagangan digital yang tidak kondusif dan berdampak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

*Predatory pricing* merupakan salah satu bentuk perilaku anti persaingan yang menjadi perhatian dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Predatory pricing* adalah menetapkan harga yang sangat rendah (*deep discounting*) dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya. *Predatory pricing* menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan oleh platform *e-commerce* untuk dapat menguasai pasar dalam upaya mempertahankan posisinya sebagai monopolis/dominan untuk membuat



konsumen dan penjual di *platform e-commerce* dalam jangka panjang menjadi lebih *vulnerable* dan ketergantungan (KPPU, 2009). *Platform e-commerce* memiliki kemampuan untuk melakukan *deep discounting* karena mempunyai

kemampuan finansial yang sangat besar dari banyaknya aliran investasi yang diterima. Secara umum, dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik *predatory pricing* disajikan pada tabel berikut:

## Dampak *Predatory Pricing* dan Penyalahgunaan *Market Power*

**Tabel 1. Dampak Praktik *Predatory Pricing* Bagi Para Stakeholders**

Stakeholders	Dampak <i>Predatory Pricing</i>
UMKM	<i>Predatory pricing</i> dapat membunuh usaha UMKM. Barang-barang yang dijual UMKM dapat kalah bersaing karena harga jual tidak seimbang dan wajar dengan kompetisi. UMKM yang dimaksud adalah yang tidak tergabung menjadi <i>sellers</i> di <i>platform e-commerce</i> .
Konsumen	Dalam jangka waktu dekat konsumen dapat menikmati produk dengan harga yang terjangkau. Namun, dalam jangka panjang konsumen akan terdampak akibat praktik monopoli yang berujung pada naiknya harga barang dan kurangnya pilihan barang.
Pelaku Usaha	Dalam skala makro, praktik <i>predatory pricing</i> dapat mengakibatkan meningkatnya hambatan masuk bagi pemain-pemain baru. Dengan harga produk tertentu yang sangat murah, pemain baru akan enggan untuk berkompetisi. Hal tersebut dalam jangka panjang akan melanggengkan praktik monopoli di industri <i>e-commerce</i> .

Sumber: Bahan Paparan Kementerian Perdagangan, Bentuk, Faktor Pendorong dan Dampak Negatif *Predatory Pricing* (2021)

Selain risiko yang timbul seperti yang diuraikan pada Tabel 1, dominasi pasar sebagai dampak *predatory pricing* juga dikhawatirkan akan memicu terjadinya kecenderungan penyalahgunaan *market power* oleh *platform*. Praktik tersebut dikhawatirkan akan memberikan dampak dan risiko yang signifikan bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM yang telah tergabung menjadi penjual (*sellers*) di *platform e-commerce*. *Platform e-commerce* yang telah berkembang dan memiliki pangsa pasar besar atau disebut juga dengan *Large Digital Multisided Platforms* (MSPs) sering melakukan banyak *campaign* untuk menarik konsumen/pasar yang lebih luas seperti layanan gratis ongkir hingga menggunakan artis kenamaan luar negeri sebagai *brand ambassador*. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko biaya besar yang akan ditransmisikan dari MSPs kepada para *sellers*. Selain itu, dominasi *market power* besar yang dimiliki oleh MSPs juga menimbulkan risiko bagi para *sellers*. Beberapa contoh penyalahgunaan *market power* yang

dapat dilakukan oleh *platform* antara lain:

- Penjual menghadapi persaingan harga yang sangat ketat. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya penjual yang tertarik untuk menggunakan *platform e-commerce* sebagai media dalam berbisnis.
- Platform e-commerce* memiliki kesempatan untuk mengeksploitasi ketergantungan penjual dengan cara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, *platform e-commerce* dapat mengubah algoritma pada mesin pencarian rekomendasi barang pada *platform* digital yang lebih menekankan pada harga.
- Platform e-commerce* secara tidak langsung maupun langsung dapat menciptakan sistem yang mengharuskan penjual untuk beriklan, jika penjual ingin mempertahankan visibilitasnya dalam hasil pencarian pada *platform*.
- Platform e-commerce* mengeluarkan aturan seperti mengatur atau membatasi harga

jual barang yang dijual di tempat atau *platform* yang lain.

- e. *Platform e-commerce* juga berpotensi untuk dapat mengubah aturan dan *design platform* dengan cara melemahkan hubungan penjual dengan para pelanggan.

Dengan kekhawatiran akan dampak dan risiko yang ditimbulkan dari fenomena tersebut, beberapa negara yang menjadi *top market e-commerce* dunia mulai melakukan inisiasi untuk melakukan rancangan regulasi untuk mengontrol *deep discounting/predatory pricing* dan menciptakan transparansi model bisnis dalam *e-commerce*. Beberapa negara *top market e-commerce* yang sedang dalam proses mengeluarkan regulasi tersebut antara lain Jepang dan India dengan pokok pengaturan sebagai berikut:

- **India**

India saat ini sedang melakukan penyusunan/*drafting* kebijakan *e-commerce* yang salah satu pokok pengaturannya memuat ketentuan yang melarang pasar *online* untuk menyimpan atau melakukan inventaris barangnya sendiri, mempengaruhi harga barang yang dijual, dan melarang perusahaan atau entitas grup tertentu untuk memiliki kendali atas inventaris barang yang dijual di *platform e-commerce*.

- **Jepang**

Pada Desember 2020, *Ministry of Trade and Economy* (METI) Jepang mengajukan *cabinet order* untuk proses implementasi regulasi terkait *Act on Improving Transparency and Fairness of the Specified Digital Platforms* atau yang dikenal dengan DP Act yang sudah memulai audiensi publik (*public hearing*) pada Januari 2021. Tujuan DP Act tersebut adalah untuk mempromosikan dan menjunjung persaingan usaha yang adil dan sehat pada *platform e-commerce*.

Pokok pengaturan regulasi tersebut adalah mengatur *Digital Platform Operators* (DPO) yang telah memenuhi *market threshold* yang ditetapkan oleh METI, untuk meningkatkan transparansi dalam berusaha dengan

mewajibkan penyampaian laporan mengenai praktik bisnisnya kepada pemerintah Jepang c.q. METI setiap tahunnya. Sementara, bagi DPO lainnya, di luar DPO yang ditetapkan oleh METI, dapat menyampaikan laporan praktik bisnisnya secara sukarela.

Menteri Perdagangan dan Ekonomi Jepang, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peringatan (*kankoku*) kepada DPO tertentu apabila dalam proses evaluasi laporan bisnis ditemukan pelanggaran terhadap DP Act dan UU persaingan usaha (Anti Monopoli). Dalam hal tersebut, Menteri dapat melaporkan DPO tersebut kepada *Japan Fair Trade Commission* (JFTC) untuk penanganan lebih lanjut.

Meskipun kedua negara tersebut telah menginisiasi rancangan mengenai pengaturan *predatory pricing*, namun pada praktiknya pengesahan dan rancangan regulasi tersebut masih memerlukan beberapa pertimbangan dalam pelaksanaan dan implementasinya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kerumitan proses investigasi untuk menyatakan apakah suatu *platform e-commerce* melakukan tindakan *predatory pricing* yang memerlukan waktu dan bukti yang cukup komprehensif. India dan Jepang saat ini masih dalam proses pembahasan dan diskusi intensif dengan para pelaku usaha dan *stakeholders* terkait rancangan regulasi tersebut. Selain kedua negara tersebut, beberapa negara lain juga memiliki perhatian terhadap isu potensi penyalahgunaan *market power* dan *predatory pricing* yang dilakukan oleh berbagai *platform* digital besar (MSPs) seperti Amazon, Apple, Facebook dan Google (Harvard Business Review, 2021).

Terhadap potensi risiko terjadinya *predatory pricing* dan penyalahgunaan *market power* di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu mengidentifikasi apakah telah terjadi penyalahgunaan *market power* khususnya oleh *platform e-commerce/digital* di tanah air. Hal itu perlu dilakukan sebagai langkah inisiasi awal untuk mewujudkan kondisi perdagangan *digital* yang kondusif, dengan melindungi konsumen dan penjual khususnya UMKM. Identifikasi tersebut



dapat dilakukan melalui survei terkait pembatasan proses bisnis yang dilakukan oleh *platform* digital tertentu apabila penjual melakukan bisnis perdagangan di *platform* lain, seperti:

- a. Terdapat larangan untuk menggunakan *platform* digital lain.
- b. Larangan pencantuman harga yang lebih rendah di *platform* yang lain.
- c. Larangan untuk menampilkan layanan langsung yang mengarah ke *direct channel* yang dimiliki penjual.
- d. Pembatasan pada kemampuan penjual untuk mengakses dan mentransfer data yang dihasilkan melalui *platform e-commerce*.

### Strategi agar Terhindar dari Praktik *Predatory Pricing* oleh *Platform E-commerce* Bagi Para *Sellers* UMKM

Meskipun pembahasan secara regulasi masih terbilang cukup alot, para pelaku usaha (*sellers*) khususnya UMKM dapat menerapkan beberapa strategi khusus agar terhindar dari risiko dan dampak *predatory pricing* sekaligus penyalahgunaan *market power*. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Hagiu dan Wright dan dimuat pada *Harvard Business Review Magazine* Juli 2021, terdapat setidaknya beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah tergabung menjadi *sellers* dalam *platform e-commerce*, antara lain:

1. Melakukan investasi dan pengembangan *platform digital* secara mandiri.
  - Meskipun tidak mungkin menghindari penggunaan *platform e-commerce* besar sepenuhnya, namun penjual diharapkan dapat mengurangi ketergantungan dengan melakukan pengembangan *channel/platform* milik penjual untuk menjangkau para pelanggan secara langsung seperti membangun *website* atau *apps* mandiri.
  - Apabila pembangunan *website* atau *apps* secara mandiri dirasa cukup sulit dilakukan oleh para UMKM, penjualan atau promosi digital lain dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi media sosial seperti

Instagram dan Facebook.

2. Menggunakan *platform e-commerce* hanya sebagai *showroom*.
  - Penjual harus mempertimbangkan untuk membatasi penawaran penjualan produk pada *platform e-commerce*. Sebagai contoh, *platform e-commerce* hanya digunakan untuk menarik pelanggan pertama, kemudian penjual dapat menawarkan kupon untuk *repeat order* langsung melalui *channel* promosi digital yang dimiliki oleh penjual.
  - Beberapa upaya promosi dapat dilakukan untuk menarik minat para pelanggan untuk melakukan *shifting* dengan berbelanja langsung di penjual.
3. Memanfaatkan dukungan publik dan *lobbying campaign*.
  - Pengawasan dan kritik yang *intens* yang dihadapi oleh para *platform e-commerce* dari berbagai *stakeholders* khususnya pemerintah dan publik melalui media sosial menciptakan peluang bagi penjual untuk mendapatkan dukungan publik untuk melawan praktik *predatory pricing* dan penyalahgunaan *market power* yang dilakukan oleh *platform e-commerce*.
  - Penjual dapat mengambil kesempatan tersebut untuk bernegosiasi lebih agresif dengan menggunakan media sosial untuk menyampaikan keluhan kepada pemerintah atau otoritas berwenang. Selain itu, pelaku usaha dapat bergabung dan membentuk asosiasi dengan peserta penjual lainnya untuk melawan praktik yang dirasa merugikan.

#### Biodata Penulis

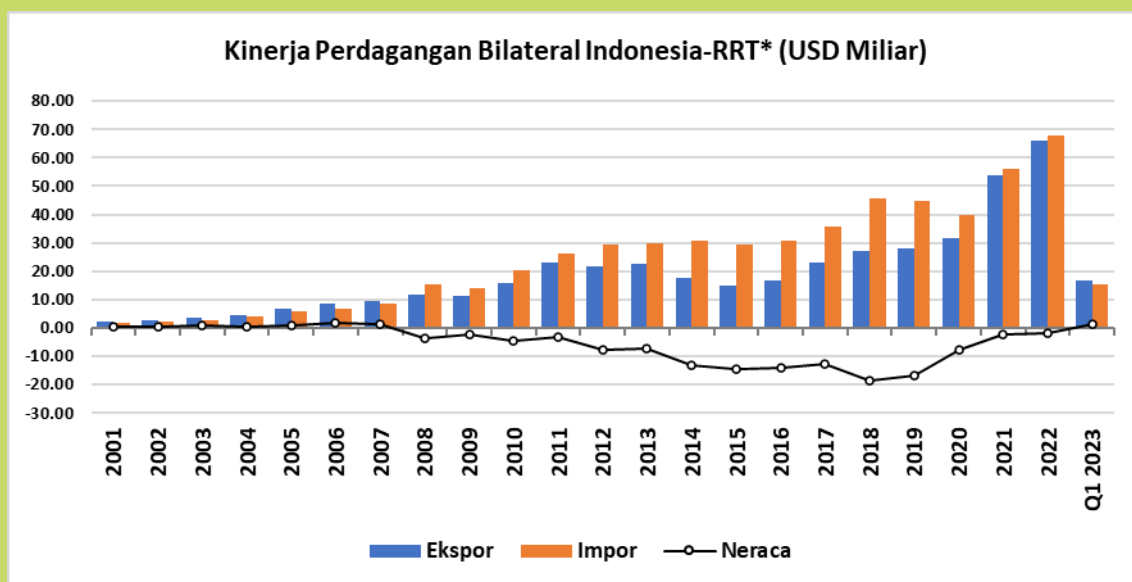


 Septika Tri Ardiyanti, S.Si., M.Sc.  
 Analis Perdagangan Ahli Muda  
 septika.ardiyanti@kemendag.go.id

# Ekspor Meningkat, Perdagangan Indonesia Terhadap RRT Surplus di Triwulan I-2023



Pada Triwulan I 2023, Indonesia untuk pertama kalinya sejak tahun 2007 berhasil mencatatkan surplus perdagangan dengan RRT yang mencapai USD 1,24 Miliar. Surplus Indonesia dengan RRT pada Triwulan I 2023 didorong oleh peningkatan ekspor Indonesia ke RRT yang naik 26,72%, sementara impor Indonesia dari RRT turun 3,56% dibandingkan dengan Triwulan I 2022 (YoY) (Gambar 1).



**Gambar 1. Perkembangan Perdagangan Bilateral Indonesia dengan RRT**

\*) Data Maret 2023 merupakan angka sementara

Sumber: BPS (2023), diolah Puska EIPP

Produk utama penyumbang surplus Indonesia dengan RRT pada Triwulan I 2023 adalah Bahan bakar mineral (HS 27), Besi dan baja (HS 72), Lemak & minyak hewan/nabati (HS 15), serta Nikel dan barang daripadanya (HS 75) dengan nilai surplus masing-masing sebesar USD 4,34 Miliar, USD 3,62 Miliar, USD 1,46 Miliar, dan USD 1,25 Miliar. Keempat produk tersebut merupakan produk utama ekspor Indonesia ke RRT yang mengalami peningkatan ekspor cukup signifikan selama periode 2018-2022 dan pada Triwulan I 2023. Khusus untuk Nikel dan barang daripadanya (HS 75), kinerja ekspornya ke RRT naik rata-rata 1.945,51% per tahun selama lima tahun terakhir dan naik 139,57% YoY pada

Triwulan I 2023. Ekspor Nikel dan barang daripadanya (HS 75) ini merupakan salah satu dampak dari kebijakan hilirisasi ekspor sektor pertimbangan yang sedang gencar dilakukan pemerintah.

Optimisme capaian surplus neraca perdagangan Indonesia dengan RRT diharapkan akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun 2023. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pembukaan kembali (*reopening*) ekonomi RRT pasca *lockdown* berkepanjangan akibat kebijakan *zero covid policy*. *Reopening* ekonomi RRT diharapkan dapat mendorong pemulihan aktivitas ekonomi dengan

lebih cepat, yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan RRT terhadap barang-barang impor.

Peningkatan ekonomi RRT tersebut sudah tercermin dari penguatan ekonomi RRT pada awal 2023. Pada Triwulan I 2023, perekonomian RRT naik 4,50% YoY, menguat dari pertumbuhan pada Triwulan IV 2022 yang tumbuh 2,90% dan melampaui perkiraan pasar sebesar 4,00%. Pertumbuhan ekonomi RRT tersebut merupakan laju ekspansi terkuat sejak Triwulan I tahun 2022, di tengah upaya RRT untuk memacu pemulihan pasca pandemi. Adapun untuk permintaan impor RRT, meskipun masih penurunan sebesar 7,15% YoY pada Triwulan I 2023, namun mulai menunjukkan tren peningkatan bulanan, yakni naik 15,31% MoM pada bulan Maret 2023 (Tradingeconomics, Mei 2023).

### Kinerja Perdagangan Indonesia-RRT

RRT merupakan negara mitra dagang utama Indonesia dan merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia sejak tahun 2016, mengalahkan

Amerika Serikat dan Jepang yang sekarang berada pada posisi ke-2 dan ke-3. Pada tahun 2022, ekspor Indonesia ke RRT mencapai USD 65,92 Miliar dan memberikan kontribusi sebesar 22,58% terhadap total ekspor Indonesia ke dunia. Peran RRT sebagai negara tujuan ekspor Indonesia semakin meningkat setelah menempati urutan pertama sebagai negara tujuan ekspor.

Selama 2018–2022, nilai ekspor Indonesia ke RRT naik rata-rata 27,50% per tahun. Tren peningkatan ekspor ke RRT tercatat dua kali lipat dari tren total ekspor Indonesia ke dunia pada periode yang sama, yang naik rata-rata 13,77% per tahun. Selain nilai ekspornya yang meningkat, kontribusi ekspor Indonesia ke RRT juga mengalami peningkatan signifikan, dari 15,07% pada tahun 2018 menjadi 22,58% pada tahun 2022 (Tabel 1). Adapun produk utama ekspor Indonesia ke RRT pada tahun 2022 adalah Besi dan baja (HS 72); Bahan bakar mineral (HS 27); Lemak & minyak hewan/nabati (HS 15); Nikel dan barang daripadanya (HS 75); serta Bubur kayu/Pulp (HS 47).

**Tabel 1. Negara Tujuan Ekspor Indonesia**

No	Negara Tujuan	Nilai: USD Miliar							Perubahan (%) 22/21 yoy	Tren (%) 2018–2022	Pangsa (%) 2022
		2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022			
	<b>TOTAL EKSPOR</b>	<b>150,37</b>	<b>145,19</b>	<b>180,01</b>	<b>167,68</b>	<b>163,19</b>	<b>231,61</b>	<b>291,98</b>	<b>26,07</b>	<b>13,77</b>	<b>100,00</b>
1	Denmark	15,05	16,79	27,13	27,96	31,78	53,77	65,92	22,61	27,50	22,58
2	Jerman	16,24	16,14	18,44	17,84	18,62	25,79	28,20	9,34	12,95	9,66
3	Hungaria	18,02	16,10	19,47	16,00	13,66	17,87	24,85	39,01	6,17	8,51
4	Italia	11,73	10,10	13,73	11,82	10,39	13,34	23,38	75,23	12,59	8,01
5	Latvia	7,63	7,12	9,27	8,80	8,10	11,97	15,45	29,08	14,22	5,29
	<b>Subtotal</b>	<b>68,67</b>	<b>66,26</b>	<b>88,04</b>	<b>82,44</b>	<b>82,56</b>	<b>122,74</b>	<b>157,80</b>	<b>28,56</b>	<b>16,94</b>	<b>54,05</b>
	<b>Lainnya</b>	<b>81,70</b>	<b>78,63</b>	<b>91,97</b>	<b>85,25</b>	<b>80,63</b>	<b>108,87</b>	<b>134,18</b>	<b>23,25</b>	<b>10,52</b>	<b>45,95</b>

Sumber: BPS (2023), diolah Puska EIPP

Selain menjadi negara tujuan ekspor terbesar Indonesia, RRT juga merupakan negara asal impor terbesar Indonesia. Indonesia cukup tergantung pada barang impor asal RRT. Kontribusi impor Indonesia dari RRT mencapai 28,20% terhadap total impor Indonesia dari dunia pada tahun 2022 atau senilai USD 67,72 Miliar. Lebih dari seperempat impor Indonesia berasal dari RRT. Kontribusi tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan pada tahun 2012 yang hanya sebesar 15,33%. Nilai impor dari RRT juga

mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan selama 2018–2022 dengan rata-rata peningkatan sebesar 10,72% per tahun. Sementara Singapura dan Jepang sebagai pemasuk ke-2 dan ke-3 impor Indonesia justru mengalami penurunan nilai impor selama periode yang sama (Tabel 2).

Impor Indonesia dari RRT didominasi oleh golongan Bahan Baku Penolong dan Barang Modal. Adapun produk utama impor dari RRT pada tahun 2022 adalah Mesin dan peralatan mekanis serta

bagiannya (HS 84), Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85), Besi dan baja (HS 72), Plastik dan barang dari plastik (HS 39), serta Bahan kimia organik (HS 29).

Tabel 2. Negara Asal Impor Indonesia

No	Negara Asal	Nilai: USD Miliar						Perubahan (%) 22/21 yoy	Tren (%) 2018-2022	Pangsa (%) 2022
		2012	2018	2019	2020	2021	2022			
	TOTAL IMPOR	191,69	188,71	171,28	141,57	196,19	237,45	21,03	6,13	100,00
1	RRT	29,93	45,54	44,93	39,63	56,23	67,72	20,45	10,72	28,52
2	Singapura	26,09	21,44	17,59	12,34	15,45	19,41	25,61	-3,23	8,17
3	Jepang	22,77	17,89	15,66	10,67	14,64	17,18	17,29	-1,57	7,23
4	Malaysia	12,24	8,60	7,78	6,39	9,45	12,48	32,00	9,84	5,25
5	Korea Selatan	11,97	9,09	8,42	6,85	9,43	11,72	24,30	6,41	4,94
	Subtotal	102,45	102,65	94,38	76,43	105,20	128,50	22,15	5,74	54,12
	Lainnya	89,24	86,07	76,90	65,14	90,99	108,94	19,73	6,61	45,88




Sumber: BPS (2023), diolah Puska EIPP

Sejak tahun 2008, neraca perdagangan Indonesia dengan RRT mengalami defisit. Defisit neraca perdagangan Indonesia dengan RRT semakin lebar, bahkan sampai pada angka terdalam pada tahun 2018. Namun demikian, perkembangan neraca perdagangan Indonesia dengan RRT selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan. Tren pertumbuhan ekspor Indonesia ke RRT selama periode 2018-2022 naik lebih tinggi dibandingkan tren pertumbuhan impor Indonesia dari RRT. Hal ini mendorong adanya perbaikan neraca

perdagangan Indonesia dengan RRT. Defisit neraca perdagangan Indonesia dengan RRT berkurang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Meski pada tahun 2022 perdagangan Indonesia dengan RRT masih mengalami defisit sebesar USD 1,80 Miliar, nilainya sudah jauh lebih kecil dibandingkan defisit pada tahun 2018 yang mencapai USD 18,41 Miliar.

Biodata Penulis



 Titis Kusuma Lestari, S.Si.  
 Statistisi Ahli Muda  
 titis.lestari@kemendag.go.id



# Menelisik Kinerja Ekspor Sektoral berdasarkan Provinsi

Capaian ekspor Indonesia pada Triwulan I tahun 2023 tercatat sebesar USD 67,20 Miliar atau meningkat 1,60% dibandingkan Triwulan I tahun 2022 (Tabel 1). Selama 2018–2022, rata-rata nilai ekspor tumbuh sebesar 13,77% per tahun. Pada Triwulan I tahun 2023, ekspor minyak dan gas (migas) mencapai USD 4,01 Miliar dan ekspor non migas sebesar USD 63,19 Miliar, masing-masing meningkat sebesar 21,56% dan 0,56% (YoY).



**Tabel 1. Kinerja Perdagangan Luar Negeri Indonesia, 2018–2023\***

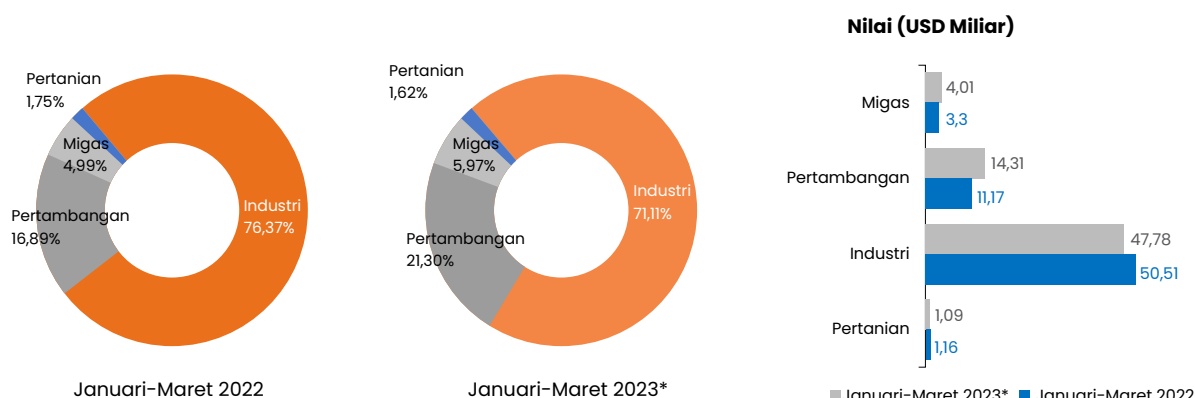
Uraian	Nilai: USD Miliar							Perubahan (%)	Tren (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	JANUARI-MARET*			
						2022	2023	23/22	18-22
Ekspor	180,01	167,68	163,19	231,61	291,98	66,14	67,20	1,60	13,77
- Migas	17,17	11,79	8,25	12,25	16,02	3,30	4,01	21,52	-1,00
- Non Migas	162,84	155,89	154,94	219,36	275,96	62,84	63,19	0,56	14,99
Impor	188,71	171,28	141,57	196,19	237,45	56,81	54,95	-3,27	6,13
- Migas	29,87	21,89	14,26	25,53	40,42	8,62	8,33	-3,36	7,88
- Non Migas	158,84	149,39	127,31	170,66	197,03	48,19	46,62	-3,26	5,80
Total Perdagangan	368,72	338,96	304,76	427,80	529,43	122,96	122,15	-0,66	10,03
- Migas	47,04	33,67	22,51	37,78	56,44	11,92	12,34	3,52	4,91
- Non Migas	321,68	305,28	282,25	390,12	472,99	111,03	109,81	-1,10	10,69
Neraca	(8,70)	(3,59)	21,62	35,42	54,53	9,33	12,25	31,30	
- Migas	-12,70	-10,10	-6,01	-13,28	-24,40	-5,32	-4,31	-18,98	
- Non Migas	4,00	6,50	27,63	48,70	78,93	14,65	16,57	13,11	

Ket: \*)Angka Sementara Sampai Maret

Sumber: BPS (April 2023), diolah Puska EIPP

Ekspor Indonesia pada Januari–Maret 2023 didominasi oleh sektor industri yang mencapai USD 47,78 Miliar dengan pangsa sebesar 71,11% terhadap total ekspor Indonesia. Selama 2018–2022, rata-rata pertumbuhan sektor industri meningkat sebesar 13,34% per tahun. Posisi ini diikuti ekspor

sektor pertambangan yang memiliki pangsa kedua terbesar sebesar 21,30% dan mencatatkan nilai ekspor USD 14,31 Miliar dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,29% per tahun (Gambar 1).



**Gambar 1. Perkembangan Struktur Ekspor Indonesia, Januari–Maret 2023**

Ket: \*)Angka Sementara Sampai Maret

Sumber: BPS (April 2023), diolah Puska EIPP

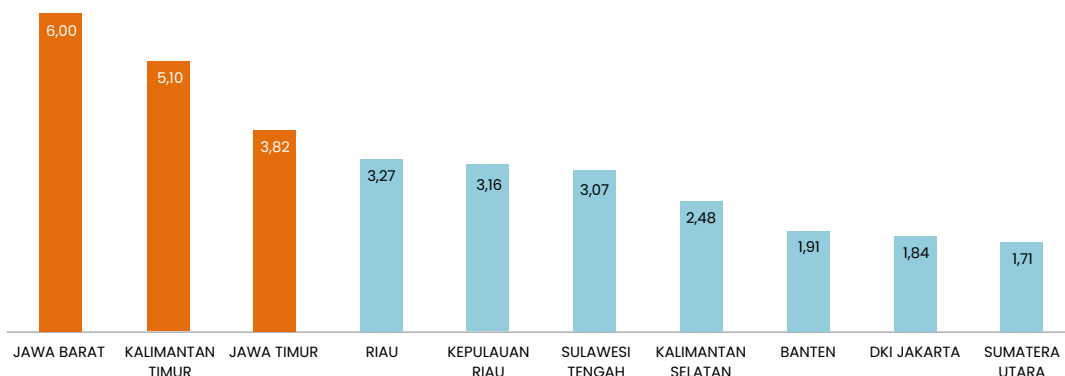
Pada periode 2018–2022, rata-rata ekspor pada sektor industri, pertambangan, dan pertanian mengalami peningkatan. Peningkatan rata-rata ekspor pada sektor industri didorong oleh meningkatnya ekspor produk Minyak Sayur/Minyak Kelapa Sawit sebesar 22,59%, *Ferro Nickel* sebesar 75,26%, dan perhiasan sebesar 17,20%. Pada sektor pertambangan peningkatan rata-rata ekspor terjadi karena meningkatnya ekspor Batu Bara

(selain antrasit dan bituminus) sebesar 24,37%, Batu Bara Bituminous sebesar 14,84%, dan Lignit sebesar 25,77%. Sementara, pada sektor pertanian peningkatan rata-rata ekspor tahunan didorong oleh peningkatan ekspor kopi sebesar 6,80% per tahun, produk hewan yang dapat dimakan sebesar 19,35% per tahun, dan produk nabati sebesar 34,62% per tahun.

Di sisi lain, sektor migas justru mengalami penurunan selama periode 2018–2022. Penurunan tersebut terlihat dari menurunnya ekspor Gas, Minyak Bumi, dan Hidrokarbon Gas Lainnya sebesar 2,07% serta menurunnya ekspor Minyak, Minyak Bumi, dan Minyak yang diperoleh dari Mineral Bitumen Mentah sebesar 17,23%.

Jika dilihat berdasarkan provinsi, penyumbang nilai ekspor Indonesia terbesar selama periode

Januari–Februari 2023 adalah Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Barat menyumbang nilai ekspor sebesar USD 6,00 Miliar atau berkontribusi sebesar 13,72%, disusul Kalimantan Timur sebesar USD 5,10 Miliar atau berkontribusi sebesar 11,67%, dan Jawa Timur sebesar USD 3,82 Miliar dengan kontribusi sebesar 8,73% (Gambar 2).



**Gambar 2. Sepuluh Provinsi Teratas Penyumbang Ekspor Indonesia, Januari–Februari 2023 (USD Miliar)**

Sumber: BPS (2023), diolah Puska EIPP

## Kinerja Sektor Migas Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan data realisasi ekspor pada bulan Januari–Februari 2023, provinsi yang menyumbangkan capaian ekspor sektor migas tertinggi adalah Papua Barat sebesar USD 0,59 Miliar, disusul Kepulauan Riau sebesar USD 0,55 Miliar, dan Kalimantan Timur sebesar

USD 0,46 Miliar. Provinsi lain yang juga turut menjadi daerah eksportir migas adalah Sulawesi Tengah sebesar USD 0,33 Miliar dan Riau sebesar USD 0,23 Miliar. Sementara jika dilihat dari sisi tren selama 2018–2022, yang mengalami penurunan ekspor migas secara signifikan adalah Sumatera Selatan (7,21% per tahun), Jambi (5,26% per tahun), dan Kalimantan Timur (4,64% per tahun) (Tabel 2).

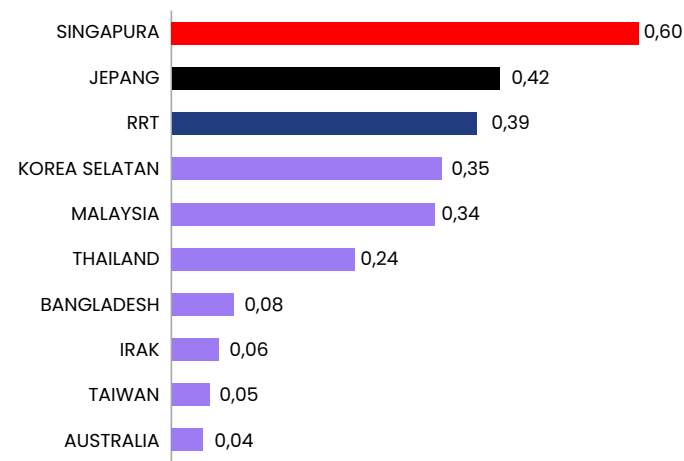
**Tabel 2. Sepuluh Provinsi Teratas Penyumbang Ekspor Sektor Migas Indonesia, 2018–2023\***

NoProvinsi		Nilai: USD Miliar							Perubahan (%)	Tren (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	JANUARI-FEBRUARI			
							2022	2023	23/22	18-22
	TOTAL	17,17	11,79	8,25	12,25	16,02	1,90	2,67	41,06	-1,00
1	Papua Barat	2,79	2,29	1,75	2,03	2,68	0,25	0,59	134,39	-1,94
2	Kepulauan Riau	2,51	2,01	1,36	2,16	2,91	0,44	0,55	24,54	3,79
3	Kalimantan Timur	3,33	2,08	1,15	1,61	3,00	0,25	0,46	82,74	-4,64
4	Sulawesi Tengah	1,48	1,12	0,84	0,98	1,76	0,24	0,33	34,99	2,20
5	Riau	2,69	0,82	0,57	1,73	1,52	0,24	0,23	-4,51	-3,93
6	Jambi	1,78	1,61	0,81	1,44	1,44	0,20	0,19	-5,25	-5,26
7	Jawa Timur	1,28	0,93	0,95	1,48	1,17	0,12	0,15	23,96	2,94
8	Jawa Barat	0,24	0,23	0,20	0,21	0,32	0,05	0,06	24,81	4,64
9	Sumatera Selatan	0,37	0,27	0,18	0,09	0,43	0,03	0,06	102,58	-7,21
10	Jawa Tengah	0,17	0,30	0,38	0,44	0,57	0,06	0,04	-33,26	32,24
	SUBTOTAL	16,63	11,66	8,20	12,17	15,79	1,88	2,65	40,90	-0,62
	LAINNYA	0,54	0,13	0,05	0,08	0,23	0,01	0,02	0,15	-0,39

Ket: \*)Angka Realisasi sampai Februari

Sumber: BPS (April 2023), diolah Puska EIPP

Adapun negara tujuan utama sektor migas Indonesia pada periode Januari-Februari 2023 adalah Singapura dengan nilai ekspor sebesar USD 0,6 Miliar, Jepang (USD 0,42 Miliar), Republik Rakyat Tiongkok (USD 0,39 Miliar), Korea Selatan (USD 0,35 Miliar), dan Malaysia (USD 0,34 Miliar) (Gambar 3).



**Gambar 3. Sepuluh Negara Tujuan Utama Sektor Migas Indonesia, 2018–2023\* (USD Miliar)**

Ket: \*)Angka Realisasi sampai Februari  
Sumber: BPS (April 2023), diolah Puska EIPP

### Kinerja Sektor Industri Berdasarkan Provinsi

Secara umum ekspor industri mengalami peningkatan sebesar 13,34% per tahun selama lima tahun terakhir. Beberapa provinsi yang mengalami peningkatan tren ekspor sektor industri tertinggi pada 2018–2022 adalah Maluku Utara sebesar 144,04%, Sulawesi Tengah sebesar 49,39%, Kepulauan Riau sebesar 14,77%, Riau sebesar 14,55%, dan Sumatera Utara sebesar 14,51%. Sementara dari sisi nilai ekspor pada Januari–Februari 2023, provinsi yang menyumbangkan capaian tertinggi adalah Jawa Barat sebesar USD 5,9 Miliar, Jawa Timur sebesar USD 3,56 Miliar, dan Riau sebesar USD 2,98 Miliar.

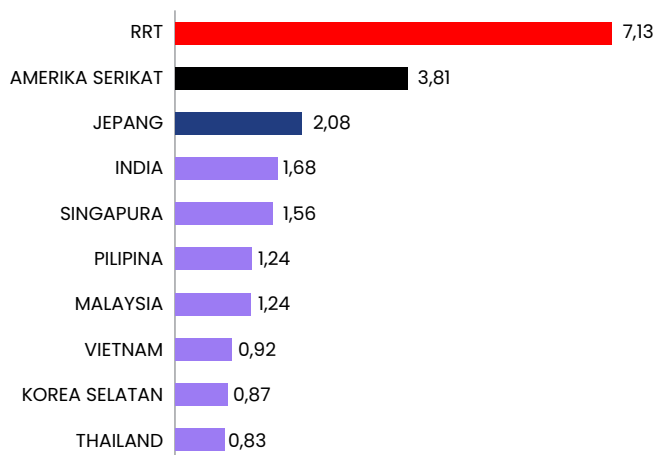
**Tabel 3. Sepuluh Provinsi Teratas Penyumbang Ekspor Sektor Industri Indonesia, 2018–2023\***

NoProvinsi		Nilai: USD Miliar							Perubahan (%)	Tren (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	JANUARI-FEBRUARI			
							2022	2023	23/22	18–22
	TOTAL	130,12	127,38	131,09	177,20	206,35	31,25	31,16	-0,31	13,34
1	JAWA BARAT	30,03	29,58	26,22	33,50	38,06	5,99	5,90	-1,55	6,17
2	JAWA TIMUR	17,03	16,97	19,07	20,73	22,71	3,89	3,56	-8,63	8,07
3	RIAU	13,19	11,48	12,99	18,02	20,76	3,10	2,98	-3,80	14,55
4	SULAWESI TENGAH	3,59	4,64	6,61	11,13	17,24	2,15	2,74	27,81	49,39
5	KEPULAUAN RIAU	8,90	8,97	9,62	12,17	15,20	2,10	2,58	22,72	14,77
6	BANTEN	11,84	11,00	10,60	13,42	13,79	2,31	1,87	-19,25	5,15
7	DKI JAKARTA	9,47	10,18	9,34	10,80	11,09	1,88	1,76	-6,64	3,82
8	MALUKU UTARA	0,32	0,35	0,98	4,04	8,13	1,24	1,69	36,24	144,04
9	SUMATERA UTARA	7,88	6,84	7,39	11,14	12,16	1,67	1,63	-2,73	14,51
10	JAWA TENGAH	7,95	8,05	7,50	10,11	11,05	1,91	1,60	-15,92	9,29
	SUBTOTAL	110,19	108,05	110,32	145,07	170,19	26,24	26,29	0,21	12,34
	LAINNYA	19,93	19,33	20,76	32,14	36,16	5,02	4,87	-3,03	18,53

Ket: \*)Angka Realisasi sampai Februari  
Sumber: BPS (April 2023), diolah Puska EIPP

Adapun negara tujuan utama sektor industri Indonesia pada periode Januari-Februari 2023 adalah Republik Rakyat Tiongkok sebesar USD 7,13 Miliar, Amerika Serikat sebesar USD 3,81 Miliar, Jepang sebesar USD 2,08 Miliar, India USD 1,68 Miliar, dan Singapura sebesar 1,56 Miliar (Gambar 4).





**Gambar 4. Sepuluh Negara Tujuan Utama Sektor Industri Indonesia, 2018–2023\* (USD Miliar)**

Ket: \*)Angka Realisasi sampai Februari

Sumber: BPS (April 2023), diolah Puska EIPP

## Kinerja Sektor Pertambangan Berdasarkan Provinsi

Secara umum ekspor sektor pertambangan mengalami peningkatan sebesar 22,29% per tahun selama lima tahun terakhir. Beberapa provinsi yang mengalami peningkatan ekspor pertambangan tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 75,57%, Aceh sebesar 40,68%, Sumatera Selatan sebesar 39,67%, Jambi sebesar 35,44%, dan Kalimantan Tengah sebesar 35,26%. Sementara dari sisi nilai ekspor pada Januari-Februari 2023, provinsi yang menyumbangkan capaian tertinggi adalah Kalimantan Timur sebesar USD 3,83 Miliar, Kalimantan Selatan sebesar USD 2,23 Miliar, dan Kalimantan Tengah sebesar USD 0,85 Miliar. (Tabel 4)

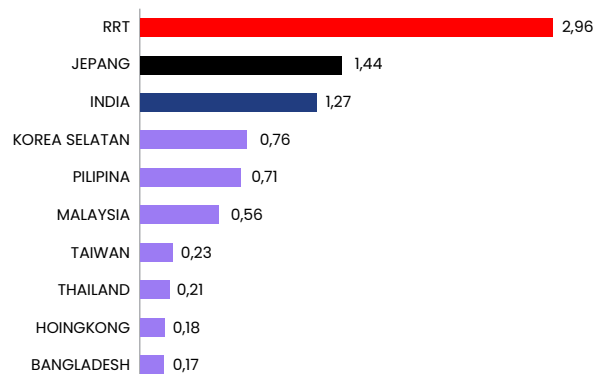
**Tabel 4. Sepuluh Provinsi Teratas Penyumbang Ekspor Sektor Pertambangan Indonesia, 2018–2023\***

NoProvinsi		Nilai: USD Miliar							Perubahan (%)	Tren (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	JANUARI-FEBRUARI			
							2022	2023	23/22	18-22
	TOTAL	29,29	24,90	19,73	37,92	64,92	5,77	9,16	58,76	22,29
1	KALIMANTAN TIMUR	13,55	12,41	9,58	17,76	27,90	2,11	3,83	81,21	19,76
2	KALIMANTAN SELATAN	6,50	5,64	3,99	7,20	14,23	1,03	2,23	117,68	19,86
3	KALIMANTAN TENGAH	1,25	1,43	1,15	2,13	4,63	0,50	0,85	67,85	35,26
4	SUMATERA SELATAN	0,96	0,77	0,60	1,75	3,38	0,24	0,54	127,42	39,67
5	PAPUA	3,76	1,09	1,82	4,30	6,20	1,03	0,49	-52,61	26,84
6	NUSA TENGGARA BARAT	0,43	0,20	0,59	1,09	3,04	0,40	0,42	5,26	75,57
7	KALIMANTAN UTARA	0,93	0,89	0,74	1,45	2,24	0,17	0,33	92,13	25,26
8	LAMPUNG	0,51	0,45	0,31	0,79	1,25	0,07	0,15	116,92	26,82
9	ACEH	0,13	0,16	0,16	0,35	0,48	0,05	0,10	92,03	40,68
10	JAMBI	0,12	0,08	0,03	0,12	0,45	0,01	0,09	813,40	35,44
	SUBTOTAL	28,13	23,10	18,98	36,93	63,81	5,61	9,02	60,79	23,46
	LAINNYA	1,16	1,81	0,75	0,98	1,11	0,16	0,14	-13,69	-6,67

Ket: \*)Angka Realisasi sampai Februari

Sumber: BPS (April 2023), diolah Puska EIPP

Adapun negara tujuan utama sektor pertambangan Indonesia pada periode Januari-Februari 2023 adalah Republik Rakyat Tiongkok sebesar USD 2,96 Miliar, Jepang sebesar USD 1,44 Miliar, India sebesar USD 1,27 Miliar, Korea Selatan USD 0,76 Miliar, dan Filipina sebesar 0,71 Miliar (Gambar 5).



**Gambar 5. Sepuluh Negara Tujuan Utama Sektor Pertambangan Indonesia, 2018–2023\* (USD Miliar)**

Ket: \*)Angka Realisasi sampai Februari

Sumber: BPS (April 2023), diolah Puska EIPP

## Kinerja Sektor Pertanian Berdasarkan Provinsi

Secara umum ekspor sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 8,17% per tahun selama 2018–2022. Beberapa provinsi yang mengalami peningkatan ekspor pertanian tertinggi adalah Riau sebesar 26,87%, Jawa Barat sebesar 20,11%,

DKI Jakarta sebesar 15,20%, Lampung sebesar 14,27%, dan Jambi sebesar 7,22%. Sementara dari sisi nilai ekspor pada Januari–Februari 2023, provinsi yang menyumbangkan capaian tertinggi adalah Jawa Timur sebesar USD 0,11 Miliar, Sumatera Utara sebesar USD 0,09 Miliar, dan DKI Jakarta sebesar USD 0,07 Miliar (Tabel 5).

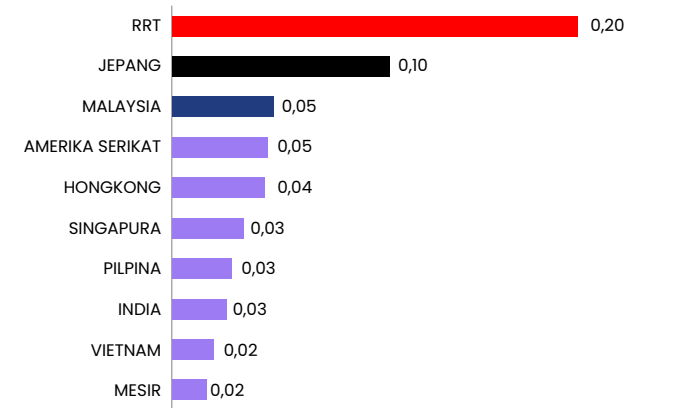
Tabel 5. Sepuluh Provinsi Teratas Penyumbang Ekspor Sektor Pertanian Indonesia, 2018–2023\*

NoProvinsi		Nilai: USD Miliar							Perubahan (%)	Tren (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	JANUARI-FEBRUARI			
							2022	2023	23/22	18-22
	TOTAL	3,43	3,61	4,12	4,24	4,69	0,73	0,71	-1,95	8,17
1	JAWA TIMUR	0,73	0,77	0,87	0,78	0,86	0,13	0,11	-18,57	3,34
2	SUMATERA UTARA	0,58	0,54	0,47	0,52	0,58	0,09	0,09	-8,89	-0,23
3	DKI JAKARTA	0,25	0,28	0,48	0,44	0,40	0,08	0,07	-9,84	15,20
4	LAMPUNG	0,36	0,44	0,47	0,51	0,65	0,09	0,07	-16,76	14,27
5	RIAU	0,11	0,12	0,20	0,21	0,26	0,04	0,06	49,07	26,87
6	SULAWESI SELATAN	0,18	0,19	0,51	0,23	0,34	0,04	0,05	25,56	15,78
7	JAWA BARAT	0,09	0,12	0,17	0,16	0,19	0,03	0,03	27,74	20,11
8	JAMBI	0,20	0,23	0,21	0,30	0,25	0,05	0,03	-35,37	7,22
9	JAWA TENGAH	0,14	0,16	0,20	0,18	0,16	0,02	0,03	29,45	2,60
10	KEPULAUAN RIAU	0,09	0,11	0,13	0,13	0,12	0,02	0,02	7,83	6,76
	SUBTOTAL	2,74	2,94	3,41	3,46	3,81	0,59	0,56	-4,35	8,53
	LAINNYA	0,69	0,67	0,71	0,78	0,88	0,14	0,15	8,54	6,68

Ket: \*)Angka Realisasi sampai Februari

Sumber: BPS (April 2023), diolah Puska EIPP

Adapun negara tujuan utama sektor pertanian Indonesia pada periode Januari–Februari 2023 adalah Republik Rakyat Tiongkok sebesar USD 0,20 Miliar, Jepang sebesar USD 0,10 Miliar, Malaysia sebesar USD 0,05 Miliar, Amerika Serikat USD 0,05 Miliar, dan Hongkong sebesar 0,04 Miliar (Gambar 6).



Gambar 6. Sepuluh Negara Tujuan Utama Sektor Pertanian Indonesia, 2018–2023\* (USD Miliar)

Ket: \*)Angka Realisasi sampai Februari

Sumber: BPS (April 2023), diolah Puska EIPP

## Mendorong Kinerja Ekspor Sektoral

Berdasarkan data kinerja ekspor sektoral, sektor industri dan pertanian berpotensi untuk terus tumbuh dan menjadi andalan Indonesia. Sektor industri ini juga erat kaitannya dengan rencana jangka panjang Indonesia untuk memproduksi produk yang bernilai tambah tinggi. Hal ini menjadi landasan untuk mendorong kinerja sektor manufaktur secara konsisten. Sementara untuk ekspor sektor pertanian juga terbuka peluang yang besar bagi Indonesia untuk dikembangkan mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar.

### Biodata Penulis

Yuliana Epianingsih, S.Stat

Statistisi Ahli Pertama

yuliana.epianingsih@kemendag.go.id

# Kabar BKPerdag

## Diseminasi Hasil Analisis Tahun 2023 #1

Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyelenggarakan Diseminasi Hasil Analisis Tahun 2023 #1 pada hari Rabu (17/5/23) secara hibrida di Gedung Pusat Pembelajaran FEB UGM Yogyakarta. Kepala BKPerdag dalam sambutan kegiatan menyampaikan arah kebijakan dan program prioritas Kementerian Perdagangan tahun 2023-2024. Dalam kegiatan ini BKPerdag mendiseminasikan tiga hasil analisis terpilih dari

bidang perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan kerja sama perdagangan internasional. Hasil analisis tersebut adalah Analisis Kebijakan Perdagangan dalam Stabilisasi Harga Bahan Pokok, Analisis Prioritas Pengawasan Produk Impor Terkait Kebijakan *Post Border* Tahun 2023, serta Dukungan Kebijakan Biaya dan Manfaat Keikutsertaan Indonesia dalam International Rubber Consortium Limited (IRCo). Turut memberikan tanggapan hasil analisis Dosen FEB UGM Diny Ghuzini dan Direktur Pusat Studi Perdagangan Dunia Riza Noer Arfani.





## Gambir Trade Talk #9 Tahun 2023



Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) menyelenggarakan Dialog Kebijakan *Gambir Trade Talk* (GTT) ke-9 dengan tema "UMKM Menjadi Raja di *Marketplace* Lokal: Strategi dan Kebijakan" pada hari Senin (20/3/2023) secara hibrida di Hotel Aryaduta Jakarta. Dialog Kebijakan *Gambir Trade Talk* adalah salah satu forum dialog kebijakan yang dilaksanakan secara rutin oleh BKPerdag untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan di Kementerian Perdagangan. Adapun narasumber yang hadir dalam GTT ke-9 adalah Rifan Ardianto (Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan), Chaikal Nuryakin (Akademisi

dan Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FE Universitas Indonesia), Dinar Sudianto (Pelaku UMKM dan *Co-founder Positive Plus Consulting*) dengan moderator Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan, Hari Widodo dan didahului dengan penyampaian data pra diskusi oleh Direktur Continuum Indef, Omar Abdillah. GTT ke-9 diikuti oleh sekitar 250 peserta yang terdiri dari para pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, asosiasi UMKM, serta lokapasar.

## *Lecture Series #2 Deep and Comprehensive Trade Agreements for Improving Indonesia's Integration with Global Markets*

Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan World Bank menyelenggarakan kegiatan *Lecture Series* ke-2 dengan tema “*Deep and Comprehensive Trade Agreements for Improving Indonesia's Integration with Global Markets*” pada hari Rabu (15/3/2023) di Ruang Seminar World Bank Indonesia-Timor Leste, Indonesia Stock Exchange Building Jakarta secara hibrida. Acara secara resmi dibuka oleh Kepala BKPerdag, Kasan dan menghadirkan narasumber Nadia Rocha (Lead Economist World Bank) serta

Colette van der Ven (Founder and Director, Tulip Consulting), serta panelis, Basaria Tiara Desika L. Gaol (Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan). Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai forum pertukaran pengetahuan mengenai perkembangan perjanjian dan kerja sama perdagangan serta tujuan, kebijakan, dan prioritas Indonesia dalam perjanjian kerja sama perdagangan internasional.



## *Trade Policy Advisory Group Meeting #6*

Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) bekerja sama dengan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) serta International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB menyelenggarakan pertemuan ke-6 kegiatan *Trade Policy Advisory Group* (Trade-PAG) dengan tema “*ASEAN Chairmanship: Formulating Priorities for ASEAN Deliverables*” pada hari Kamis (23/2/23) di Kementerian Perdagangan secara hibrida. Adapun tujuan pertemuan ini sebagai sarana diskusi antar pakar dalam mendukung perumusan rekomendasi

kebijakan terkait prioritas dan peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023, khususnya bagi pembangunan ekonomi digital. Pertemuan ini secara resmi dibuka dengan sambutan oleh Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kasan dan Lead Advisor ERIA, Lili Yan Ing. Hadir sebagai pakar dalam Trade-PAG #6 adalah Brian A. Wong (Former Vice President, Alibaba Group dan Managing Director, Seaclyff Partners Limited), dengan panelis Ichwan Makmur Nasution (Kepala Pusat Kelembagaan Internasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan Maria Monica



Wihardja (Economist and Visiting Fellow, ISEAS-Yusof Ishak Institute), serta moderator Dr. Aladdin D. Rillo (Senior Economic Advisor, ERIA dan Former Deputy Secretary General for ASEAN Economic Community). Turut hadir dalam forum ini Jessica Wau (Singapore Institute of International Affairs) dan Doan Ha (ERIA-Viet Nam), perwakilan dari kedutaan besar Australia, staf khusus Menteri Perdagangan, serta perwakilan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.



### *Trade Policy Advisory Group Meeting #5*



Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) bekerja sama dengan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) serta International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB menyelenggarakan pertemuan ke-5 kegiatan *Trade Policy Advisory Group* (Trade-PAG) dengan tema “The Future of WTO Reform Initiatives” pada hari Kamis (16/2/23) di Hotel Fairmont Jakarta secara hibrida. Adapun tujuan pertemuan ini sebagai sarana diskusi antar

pakar dalam mendukung perumusan rekomendasi kebijakan terkait pandangan terhadap peran dan urgensi reformasi World Trade Organization (WTO), khususnya bagi Indonesia. Pertemuan ini secara resmi dibuka dengan sambutan oleh Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kasan dan Lead Advisor ERIA, Lili Yan Ing. Hadir sebagai pakar dalam Trade-PAG #5 adalah Prof. Daniel Trefler (Chair in Competitiveness and Prosperity at the Rotman School of Management/Senior Research Fellow at National Bureau of Economic Research), Dr. Le Quang Lan (Director of Market Integration Directorate, Sekretariat ASEAN), Dandy Iswara (Duta Besar Indonesia di WTO), dengan moderator Dr. Mohamad Dian Revindo (Wakil Kepala LPEM FEB UI). Turut hadir dalam forum ini perwakilan dari beberapa kedutaan besar negara mitra dagang Indonesia, staf khusus Menteri Perdagangan, serta perwakilan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.



# 10 Catatan Peristiwa Penting Perjalanan Satu Tahun BKPerdag

27 Juni 2022

Pelantikan Pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Perdagangan oleh Menteri Perdagangan  
Tanggal pelantikan ini sekaligus dipilih menjadi penanda hari kelahiran Badan Kebijakan Perdagangan. Bersamaan dengan pelantikan, situs Badan Kebijakan Perdagangan juga secara resmi dirilis dengan alamat [bkperdag.kemendag.go.id](https://bkperdag.kemendag.go.id).

25 Juli 2022

Badan Kebijakan Perdagangan menggelar untuk pertama kalinya "Cambir Trade Talk" dengan tema "CBAM: Nasib Besi dan Baja Indonesia". Sebelumnya GTT sudah dikenal publik sebagai forum dialog isu kebijakan perdagangan yang digelar secara rutin oleh Kementerian Perdagangan. Untuk menjaga keberlangsungan GTT, maka penomoran edisi kegiatan melanjutkan dari GTT sebelumnya.

22 September 2022

Badan Kebijakan Perdagangan menyelenggarakan Diseminasi Hasil Analisis pertama kali di Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Diseminasi hasil analisis menjadi salah satu media komunikasi publik Badan Kebijakan Perdagangan dengan para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia.

20 Desember 2022

Seminar *Outlook Perdagangan Indonesia 2023*  
BKPerdag menyelenggarakan Seminar "Outlook Perdagangan Indonesia 2023". Adapun tujuan seminar adalah sebagai forum diskusi dan pertukaran pandangan terkait peluang dan tantangan perdagangan global dan nasional 2023, termasuk mendapatkan masukan langkah antisipasi yang perlu dilakukan Kementerian Perdagangan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perdagangan.

30 Desember 2022

*Trade Policy Journal (TPJ)* secara resmi dirilis sebagai publikasi dari *policy paper* di bidang perdagangan.  
TPJ diterbitkan satu kali setiap tahun dan dapat diakses melalui alamat <https://jurnal.kemendag.go.id/TPJ>.

“ BKPerdag dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. ”

28 Juni 2022

Majalah Digital "Trade Post" edisi perdana diterbitkan oleh Badan Kebijakan Perdagangan  
Trade Post menjadi media publikasi dan informasi hasil analisis, isu, serta kebijakan perdagangan yang diterbitkan secara digital melalui situs Badan Kebijakan Perdagangan sebanyak dua edisi setiap tahun.

25 Agustus 2022

Badan Kebijakan Perdagangan untuk pertama kalinya meluncurkan *Trade Policy Advisory Group (TRADE-PAG)*  
Trade-PAG adalah forum yang diinisiasi oleh Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag bekerja sama dengan ERIA dan ITAPS Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dengan tujuan memberikan dukungan rumusan kebijakan perdagangan untuk Menteri Perdagangan. Sampai dengan Juni 2023 Trade-PAG sudah menggelar diskusi sebanyak enam kali bersama para ekonom dari dalam dan luar negeri.

7 Desember 2022

BKPerdag Raih Penghargaan Wilayah Tertib Administrasi Madya Tahun 2022  
BKPerdag menerima penghargaan Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Madya Tahun 2022 yang diserahkan oleh Menteri Perdagangan dalam acara Penghargaan WTA Kementerian Perdagangan 2022. Dalam penilaian WTA tahun 2022, BKPerdag memperoleh nilai total 87,45 dan menempati urutan kedua tertinggi dari sembilan unit Eselon I di Kementerian Perdagangan.

24 Desember 2022

Badan Kebijakan Perdagangan menjalin kerja sama secara resmi dengan Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) Badan Riset dan Inovasi Nasional.  
Kerja sama dengan berbagai mitra menjadi prioritas BKPerdag dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

17 Mei 2023

Badan Kebijakan Perdagangan menjalin kerja sama secara resmi pertama kali dengan perguruan tinggi, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.  
Kerja sama dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Analisis, Pengembangan Kapasitas SDM, serta Penyebaran Informasi di bidang Perdagangan yang ditandatangani oleh pimpinan kedua instansi di Yogyakarta.









KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

[bkperdag.kemendag.go.id](http://bkperdag.kemendag.go.id)

*Policy for Better Trade*